PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN TRANSAKSI *E-COMMERCE* PADA PELAKU UMKM *SHOPEEFOOD*

(Studi Kasus Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh :

Siti Lu'lu'uz Zakiyah

1805046116

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) sks

Hal : Naskah Skripsi

A.n.Sdri Siti Lu'lu'uz Zakiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Lu'lu'uz Zakiyah

NIM : 1805046116

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi *E-commerce* Pelaku UMKM *Shopeefood* (Studi Kasus di Kecamatan Tembalang Kota Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I	Pembimbing II
Dessy Noor Farida, SE, M.Si, AK CA	**RakhmatDwi Pambudi, M.Si**
197912222015032001	**198607312019031008**

ii

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan. Telp. /Fax (024) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul	: **Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi *E-commerce* Pada Pelaku UMKM *Shopeefood* (Studi Kasus Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang)**
Penulis	: Siti Lu'lu'uz Zakiyah
NIM	: 1805046116
Jurusan	: S1 Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal:

30 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 30 juni 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Cita Sari Dja'akum, A.Md., S.H.I, M.E.I
NIP. 198204222015032004

Sekretaris Sidang,

Warno, S.E, M.Si
NIP. 198307212015031002

Penguji Utama I,

Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E, M.Si
NIP. 197905122005012004

Penguji Utama II,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 197108301998031003

Pembimbing I,

Dessy Noor Farida, S.E, M.Si, AK, CA
NIP. 197912222015032001

Pembimbing II,

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si
NIP. 198803312019032012

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya.

PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk ucapan terimakasih, saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang sudah memberi dukungan serta doa demi kesuksesan dan kelancaran penulisan skripsi ini terkhusus kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta yaitu bapak Nur Asikin beserta ibu Muntasiroh dan tidak lupa adek saya tersayang Mu'jizat Nur Alif yang selalu mengasihi dan mencintai saya sepenuh hati, yang tiada henti memberikan doa dan dukungan kepada saya baik berupa materi maupun non materi.
2. Keluarga besar saya yang telah memberikan doa dan dukungannya.
3. Mamas saya tercinta Arif Purwanto yang selalu memberikan hal istimewa.
4. Teman-teman saya tercinta AKS C terkhusus untuk Selinda Rahma Indah dan Saniya Salsabila yang selalu memberikan semangat dan selalu ada buat saya dari awal kuliah sampai sekarang.
5. Teman saya Eva Laila Rahmawati yang senantiasa menemani saya melakukan penelitian ini dan juga tidak lupa teman saya yang bersedia mengorbankan laptopnya demi saya agar segera menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran dari orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 17 Juni 2022

Deklarator



Siti Latifatuz Zakiyah

NIM 1805046116

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pengalihan dari suatu huruf kehuruf lain. Dalam penulisan skripsi, proses transliterasi menjadi hal yang sangat penting karena didalamnya terkandung istilah arab yang harusnya ditulis huruf arab menjadi huruf latin. Oleh karena itu, transliterasi perlu ditetapkan untuk menjamin konsistensi penulisan skripsi sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	‘	16	ط	Thh
2	ب	B	17	ظ	Zh
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Sh	29	ي	Y
15	ض	Dl			

Hamzah (ء) yang letaknya diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau ahir maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

C. Diftong

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ْي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَ ْو	Fathah dan wau	Au	A dan U

D. Syaddah *(Tasydid)*

Transliterasi dalam bentuk tulisan arab dilambangkan dengan konsonan ganda atau pengulangan huruf dan huruf yang mempunyai tanda *tasydid*. Contohnya : اَلرَّحْمٰنُ : *Arrahman*

E. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis menggunakan *al-... contohnya* اَلرَّحْمٰن = ar-rahman, al ditulis dengan huruf kecil kecuali ketika diawal kalimat.

F. Ta' Marbuthah

1. Apabila dimatikan atau mendapat harakat sukun di akhir kata transliterasinya harus ditulis dengan huruf h.
   Contoh : عائشة : *Aisyah*
2. Apabila dihidupkan dengan cara dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, penulisan transliterasinya berupa t.
   Contoh : زكاة الفطر : *zakatul-fitri*

ABSTRAK

Pajak menjadi tulang punggung negara maka dari itu, dana pembangunan negara didominasi dari pendapatan penerimaan pajak. Akan tetapi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih terbilang rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah *tax ratio* di Indonesia yang kurang sehat pada tahun 2021 karena masih berada di angka 8,4% padahal pada tahun 2024 target *tax ratio* sebesar 9,4%. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*, untuk menguji secara empiris tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*, untuk menguji secara empiris sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*, dan untuk menguji secara empiris kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce.*

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan IBM SPSS Statistic 25, dengan jumlah sampel atau wajib pajak UMKM *shopeefood* di kecamatan Tembalang kota Semarang sebanyak 84 responden yang diolah menggunakan rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan data primer melalui penyebaran kuisioner yang kemudian diproses dan dianalisis menggunakan analisis *regresi linier berganda*. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *non-probability sampling* dengan jenis *convinence sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahannya menemukan responden untuk dijadikan sampel.

Hasil dari penelitian ini menunjukan variabel pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce,* variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*, variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce,* dan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*.

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Taxes are the backbone of the state, therefore, state development funds are dominated by tax revenue. However, taxpayer compliance in Indonesia is still relatively low. This is evidenced by the number of tax ratios in Indonesia that are not healthy in 2021 because they are still at 8,4% even though in 2024 the tax ratio target is 9,4%. The purpose of this study is to empirically test the effect of Understanding Tax Regulations on taxpayer compliance with e-commerce transactions, to empirically test the effect of tax rates on taxpayer compliance with e-commerce transactions, to empirically test the effect of tax sanctions on mandatory compliance taxes with e-commerce transaction, and to empirically test the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance with e-commerce transactions.

This type of research is a quantitative research using IBM SPP Statistic 25, with the number of samples or UMKM tax payers of shopeefood UMKM tax prayer responden in Tembalang district, Semarang City as many as 84 respondents who are processed using the slovin formula.. Data collection using primary data through the distribution of questionnaires wich were then analyzed using multiple linear regression analysis. The method used in sampling is a non-probability sampling technique with the type of convenience sampling, namely sampling based on the ease of finding respondents to be used as samples.

The results of this study indicate that the variable understanding of tax regulations has no significant effect on taxpayer compliance with e-commerce transactions, the variable tax rate has no significant effect on taxpayer compliance with e-commerce transactions, the variable tax sanctions does not significant effect taxpayer compliance with e-commerce transactions, and the taxpayer awareness variable has a significant effect on taxpayer compliance with e-commerce transcations.

***Keywords** : understanding of tax regulations, tax rates, tax sanctions, taxpayer awareness, taxpayer compliance.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul *"Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak dengan transaksi e-commerce pada pelaku UMKM shopeefood (studi kasus di Kecamatan Tembalang Kota Semarang)."* Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan safaat nya di yaumul qiyamah kelak.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan progam studi strata 1 di kampus Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran sangat dibutuhkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Pelaksanaan penulisan skripsi tentunya tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Nur Asikin dan Ibu Muntasiroh kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan beserta doa yang sangat luar biasa.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para wakilnya.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saefullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walinsogo Semarang.
4. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Ibu Dessy Noor Farida, SE, M.Si, AK CA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan masukan dengan sabar.
6. Bapak Prof. Dr. Mujiyono, MA. Selaku Wali Dosen dari semester 1 sampai sekarang yang selalu memberi motivasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Syariah dan karyawan seluruh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat saat menempuh study di kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Seluruh pihak pelaku UMKM *Shopeefood* di kecamatan Tembalang yang telah bersedia mengisi kuisioner yang penulis bagikan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Syariah khususnya kepada kelas AKS-C yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu..
10. Semua pihak yang belum tercantum dalam skripsi ini karena peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah memberikan doa beserta dukungannya baik secara materi maupun non materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas semua dukungannya kepada semua pihak yang sudah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua pihak yang bersedia berkontribusi dengan ikhlas mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ahir kata saya ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Semarang, 17 Juni 2022



Siti Lu'lu'uz Zakiyah

1805046116

DAFTAR ISI

JUDUL.....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii
PENGESAHAN.....iii
MOTTO iiv
PERSEMBAHAN.....v
DEKLARASI.....vi
TRANSLITERASI..... vii
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI..... xiv
DAFTAR TABEL..... xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR LAMPIRAN..... xviii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan dan Manfaat..... 9
1.4 Sistematika Penulisan..... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12
2.1 Landasan Teori 12
2.1.1 Teori Atribusi..... 12
2.1.2 *E-Commerce* 13
2.1.3 Shopee..... 15
2.1.4 Pajak..... 17
2.1.5 Pajak UMKM..... 23
2.1.6 Peraturan Pajak *E-commerce* 24
2.1.7 Tarif Pajak..... 25
2.1.8 Sanksi Pajak..... 27
2.1.9 Kesadaran Wajib Pajak..... 29

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi *E-commerce* 30
2.2 Penelitian Terdahulu 31
2.3 Kerangka Teoritik 38
2.4 Pengembangan Hipotesis 40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 44
3.1 Jenis Penelitian 44
3.2 Sumber Penelitian 44
3.3 Populasi Dan Sampel 45
3.4 Metode Pengumpulan Data 46
3.5 Skala Pengukuran 47
3.6 Variabel dan Indikator Penelitian 47
3.7 Teknik Analisis Data 51
3.8 Uji Asumsi Klasik 52
3.9 Pengujian Hipotesis 54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 57
4.2 Gambaran Umum Responden 57
4.3 Teknik Analisis Data 59
4.4 Uji Kualitas Data 60
4.4.1 Uji Validitas 60
4.4.2 Uji Reliabilitas 63
4.5 Uji Asumsi Klasik 64
4.5.1 Uji Normalitas 64
4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 66
4.5.3 Uji Multikolonieritas 66
4.6 Pengujian Hipotesis 67
4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 67
4.6.2 Uji T 69
4.6.3 Koefisien Determinasi 70
4.7 Pembahasan Penelitian 71
BAB V PENUTUP 78

5.1 Kesimpulan 78
5.2 Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN 85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 33

Tabel 3.1 Variabel, Definisi, Indikator & Skala Pengukuran Variabel 48

Tabel 4.1 Demografi Responden..... 58

Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Deskriptif..... 59

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas..... 61

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas..... 64

Tabel 4.5 Hasil Uji *Probability Plot* 65

Tabel 4.6 Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* 65

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 66

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas 67

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi..... 68

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi..... 71

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.2 Kerangka Teoritik 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisioner Penelitian 85

Lampiran 2 Dokumentasi Pengisian Kuisioner..... 94

Lampiran 3 Jawaban Responden..... 96

Lampiran 4 Hasil Output SPSS Statistik Deskriptif 116

Lampiran 5 Hasil Output - SPSS Uji Validitas 118

Lampiran 6 Hasil Output - SPSS Uji Reliabilitas 125

Lampiran 7 Hasil Output - SPSS Uji Asumsi Klasik..... 127

Lampiran 8 Hasil Output - SPSS Uji Hipotesis 129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman diiringi menggunakan kemajuan teknologi yang semakin canggih, membuat dunia dapat bersatu tanpa harus ada sebuah pertemuan. Hal itu dilihat dari perkembangan kemajuan teknologi itu sendiri. Salah satu kemajuan teknologi adalah munculnya *smartphone* dan internet sebagai alat komunikasi maupun transaksi. Hal ini memudahkan manusia untuk saling berinteraksi satu sama lain.

Dengan kemajuan teknologi yang begitu signifikan, akses informasi menjadi sangat cepat menyebar dan tertangkap oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan masyarakat dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi diluar daerah, kota maupun Negara. Adapun contohnya, pertama dalam hal transaksi ditandai dengan kemunculan dompet digital *(E-wallet)* yang dimanfaatkan sebagai alat bertransaksi secara *online* seperti Dana, Gopay dan Ovo. Kedua, kegiatan antar jemput *online* dengan transportasi menggunakan Grab dan Gojek. Ketiga, kegiatan jual beli *online* melalui *E-commerce* baik Lazada, Bli-bli, Tokopedia, Bukalapak dan Shopee.

E-commerce semakin populer dan digemari masyarakat karena keluasan dan kecepatannya dalam mengakses jaringan internet dengan berbagai media, bahkan transaksi *e-commerce* bersifat fleksibel sehingga menjadikan bisnis tersebut mengalami peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Dapat dilihat dari penelitian Clement tahun 2019, *e-commerce* menyumbang 10,2% dari total penjualan ritel global pada tahun 2017 dan terjadi peningkatan sebesar 11,9% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 diperkirakan *e-commerce* menyumbang penjualan ritel global mencapai 13,7%, sedangkan prediksi pada tahun 2021 akan mencapai 17,5% dengan total penjualan ritel dari *e-commerce* mencapai US$ 4,9 Miliar[1].

[1] Putri dwi Indriyani, "Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku e-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan" (2020): 1–143.

Menurut penelitian dari *Center of Innovation Policy and Governance* (CIPG), Indonesia menjadi salah satu negara dengan laju penetrasi internet yang tinggi di Asia dengan angka yang mencapai 51%[2]. Hal ini didukung dengan adanya fakta lain yang membuktikan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021[3]. Dengan adanya jumlah tersebut, Indonesia menjadi urutan ketiga pengguna internet terbanyak di Asia. Masifnya pengguna internet tersebut, memunculkan sebuah *icon* baru pada *E-commerce* Shopee yang menyerupai *Gofood* maupun *Grabfood*, pesan antar makanan *online* atau *food delivery* yang bernama *Shopeefood*.

PT Shopee Indonesia merupakan salah satu *E-commerce* yang mulai masuk ke pasar Indonesia pada ahir bulan Desember 2015. Shopee membawa pengalaman berbelanja dengan model baru. Shopee juga telah memberikan fasilitas untuk penjual agar berjualan dengan mudah dan membekali konsumen dengan melakukan pembayaran yang secara aman serta mempunyai pengaturan logistik yang terintegrasi[4]. Selama bulan Agustus 2021, pengunjung aktif harian Shopee mencapai 28,35 juta jiwa[5]. Shopee yang telah hadir dengan fitur baru pada *iconnya* yang bernama *ShopeeFood* yaitu *food delivery* sudah resmi diluncurkan pada bulan Januari 2021. Kemunculan *shopeefood* yang menerapkan fitur-fitur seperti gratis ongkir, *cashback*, promo, *discount* sampai 75% menjadi sebuah daya tarik pecinta kuliner bagi masyarakat[6]. Tawaran tersebut menjadi peluang bisnis yang besar bagi para pelaku UMKM karena dapat memicu naiknya pendapatan,

---

[2] Saefullah, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Terhadap Karakter Anak," *30 November*, last modified 2020, accessed January 11, 2022, https;//bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak.

[3] Dwi Hadya Jayani, "Penetrasi Internet Indonesia Meningkat Saat Pandemi Covid-19."

[4] Shintiya Betra Yana, "Pengaruh Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi E-Commerce Di Shopee Pada Distributor Masker Jakarta Timur," *skripsi STIEI* (2021): 01.

[5] Bisnis Jakarta, "Siapa Yang Jadi E-Commerce No. 1 Indonesia Tahun Ini?," *31 Oktober*, last modified 2021, accessed January 12, 2022, https://www.bisnisjakarta.co.id/2021/10/31/siapa-yang-jadi-e-commerce-no-1-indonesia-tahun-ini/#:~:text=Data-data di atas menunjukkan,commerce yang paling mereka percaya.

[6] Anisa'ul Khomariyah, "Peluang Bisnis Makanan Dan Minuman Di Shopee Food Bagi UMKM" (2021): 1–10.

UMKM merupakan salah satu usaha yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap pendapatan pajak Negara.

Berdasarkan pendekatan hukum islam, pajak berupa *Kharaj* (pajak tanah/ tanaman), *Usyur* (pajak perdagangan), dan *Jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup didalam perlindungan Negara/ pemerintah Islam). Pajak yang disebut juga dengan *Al-Maksayau Adh-Dharibah,* artinya pemungut pajak memungut pajak dari rakyat. Sedangkan pajak berasal dari bahasa arab yaitu *Dharibah* yang artinya hutang yang harus dibayar[7]. Pajak merupakan pembayaran yang memiliki sifat memaksa masyarakat karena adanya alasan tertentu yang menyebabkan wajib membayar pajak. Diantaranya yaitu karena seseorang memiliki penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) berdasarkan peraturan Undang-Undang Pajak yang berlaku[8].

Dalam tinjauan islam pajak diberlakukan dengan adil dan selaras yang didasarkan pada ajaran agama islam dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar (Maslahat). Islam mewajibkan umatnya untuk menggunakan harta dan jiwa yang dimiliki senantiasa untuk perkara yang baik saja. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: berangkatlah kamu baik dalam keadaan yang merasa ringan maupun berat dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu dijalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui[9].

[7] Elisa Martha Hanum Basyaroh, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sanksi Perpajakan, Dan Reliugitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Samarang," *Skripsi UIN Walisongo* (2021): 01.

[8] Ulin Nikmah, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kudus," *Skripsi UIN Walisongo* (2020): 01.

[9] *Q.S At Taubah : 41*, n.d.

Pada surat At Taubah ayat 41 diatas mempunyai makna bahwasanya umat islam diwajibkan mengeluarkan hartanya untuk sesuatu perkara yang baik dan benar. Pemungutan pajak oleh Negara juga mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat, sehingga pemungutan pajak diperbolehkan selama tidak merugikan masyarakat.

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2020 mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, yaitu meliputi hak dan kewajiban wajib pajak, termasuk yang mengurangi pajak dan yang memungut. Sedangkan pajak UMKM tercantum dalam PP No.23 Tahun 2018 yaitu peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan atas pendapatan dari Usaha yang diperoleh Wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto Tertentu. Dengan tarif final pajak UMKM yang resmi diturunkan dari 1% menjadi 0,5%, dalam hal ini omset tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam setahun dan ditetapkan pengusaha kena pajak jika omzet melampaui Rp. 4,8 Miliar. Dengan tarif tersebut pemerintah memiliki tujuan yaitu untuk menumbuhkan daya saing dengan produk-produk impor diera digital sekarang. Metode pengenaan pajaknya tergantung dari kriteria dan klasifikasi dari usaha wajib pajak tersebut seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Peraturan pajak yang dikenakan juga tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konven. Mengenai mekanismenya, sementara ini akan dilakukan pengkajian ulang untuk menggunakan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), untuk menentukan siapa yang memungut, dan melaporkan[10].

Implementasi perpajakan *E-commerce* diatur oleh Sri Mulyani dalam peraturan menteri keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan dengan system elektronik yang efektif sejak 1 April 2019 yang ditargetkan kepada penyedia dan seluruh pemilik UMKM yang menggunakan *e-commerce*. Salah satu yang wajib dipenuhi adalah wajib pajak memperlihatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia

[10] Susana Liminata, "Analisis Peraturan Pajak E-Commerce, Tarif Pajak E-Commerce, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Dengan Sistem E-Commerce," *Skripsi STIE* (2019): 02.

platform marketplace dan apabila tidak memiliki NPWP pelaku UMKM wajib melapor dan menyerahkan NIK pada penyedia *platform marketplace* agar secepatnya dapat menjalankan kewajiban pph dengan tarif final yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Diberlakukannya sanksi pajak bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepatuhan wajib pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya. Pemberian sanksi pajak yang memberatkan wajib pajak agar memberikan rasa jera terhadap pelanggarnya sehingga dapat memunculkan tingginya kepatuhan sebagai wajib pajak UMKM *e-commerce.* Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa adanya peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan dituruti.

Kesadaran Wajib pajak akan pembayaran pajak dengan tepat waktu dapat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Mengingat bahwa sistem perpajakan Indonesia sesuai dengan sistem *self assessment* yang memberdayakan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang, kepatuhan wajib pajak yang tinggi menjadi factor penting[11]. Dengan sistem pembayaran pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* wajib pajak diharapkan mampu memiliki kepatuhan dan Kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Selain itu, pengetahuan akan tarif dan sanksi pajak juga sangat penting bagi wajib pajak agar dapat menghitung dan mematuhi kewajiban pajaknya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pajak merupakan bagian dari tulang punggung Negara, maka dari itu pembangunan Negara di Indonesia sangat bergantung terhadap penerimaan Negara dari pajak. Dalam postur APBN tahun 2020, sekitar 83% pendapatan Negara bersumber dari penerimaan perpajakan. oleh karena itu, pembangunan sangat bergantung pada partisipasi warga Negara dalam memenuhi kewajiban pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak,

[11] Cintya Caroline, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Skripsi Universitas Multimedia Nusantara,* (2021): 08.

akan tetapi hal tersebut masih menjadi tantangan besar bagi direktorat jenderal pajak (DJP) karena membangun kesadaran pajak sama halnya dengan membangun mental masyarakat, artinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencipatakan generasi sadar pajak[12]. Hal ini dapat dilihat dari jumlah *tax ratio* yang kurang sehat di Indonesia karena pada dasarnya *tax ratio* itu menunjukan kepatuhan perpajakan. hal tersebut dapat dilihat dari rumus *tax ratio* itu sendiri, yakni penerimaan pajak dibagi PDB. Berdasarkan data dari *Kemenkeu*, *tax ratio* terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 di Indonesia masih belum mencapai target yaitu berada diangka 8,4% yang seharusnya ditargetkan sebesar 9,4% ditahun 2024[13].

Selain itu, salah satu faktor yang yang menjadi rendahnya tax ratio di Indonesia menurut Hayyu tahun 2018 yaitu maraknya praktek penghindaran pajak. Selain berpengaruh langsung terhadap pendapatan pajak hal tersebut juga berdampak terhadap kurang maximalnya kinerja pemungutan pajak[14]. Dengan hal tersebut kepatuhan wajib pajak masih terbilang sangat minim dikarenakan sebagian besar dari pelaku UMKM banyak yang tidak melaporkan kewajiban pajaknya dengan dalih masih dalam masa percobaan atau perintisan usaha menggunakan *e-commerce*.

Direktorat Jendral Pajak sudah membuat beberapa surat edaran mengenai penegasan pembayaran PPh dari *e-commerce,* yaitu SE/62/PJ/2013 mengenai penegasan undang-undang perpajakan terhadap transaksi *e-commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 mengenai Pemutungan maupun pemotongan PPh atas transaksi *e-commerce*. Akan tetapi eksistensi dari surat edaran tersebut belum bisa

---

[12] Nela Agustina Muilawati, "Kompleksitas Pajak: Tax Ratio, Perekonomian, Dan Kesadaran Pajak," last modified 2021, accessed February 24, 2022, https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/kompleksitas-pajak-tax-ratio-perekonomian-dan-kesadaran-pajak.

[13] "UU HPP Dapat Naikkan Penerimaan Negara Dan Tax Ratio," *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, last modified 2021, accessed February 24, 2022, https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-uu-hpp-dapat-naikkan-penerimaan-negara-dan-tax-ratio/.

[14] Indriyani, "Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku e-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan."

memberikan implikasi hukum yang lebih kuat kepada pelaku *e-commerce*. karena faktanya, penerapan dari surat edarannya masih belum diterima dengan maksimal. Mempertimbangkan system pemungutan pajak penghasilan yang menggunakan *self assessment system* yang telah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang. akibatnya, apabila DJP tidak mempunyai data lain selain yang dilaporkan oleh wajib pajak, maka laporan wajib pajak tersebut dianggap benar.

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Masayarakat kota semarang sebagian besar berprofesi sebagai pengusaha mikro kecil dan menengah. Jumlah UMKM di kota Semarang meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dari data iumk.semarangkota.go.id jumlah UMKM sampai pada tanggal 11 Maret 2022 mencapai angka 17.603[15]. Salah satu Kecamatan yang ada di Kota Semarang dengan total pengusaha UMKM terbanyak urutan ke-2 adalah Kecamatan Tembalang.

Kecamatan tembalang merupakan salah satu kecamatan yang banyak dijumpai para pengusaha mikro kecil dan menengah, salah satunya yaitu penjual makanan dan minuman. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat para pelaku UMKM mengenal system penjualan yang dilakukan secara *Online*, dimana dalam penjualan Online mempunyai banyak kelebihan seperti lebih praktis dan efisien, banyak promo dan *discount*, dan system pembayaran lebih mudah. Selain itu ada beberapa manfaat yang dirasakan penjual seperti menjual produk tanpa harus menyewa ruko, cocok untuk memulai usaha dengan modal yang terbatas serta jangkauan konsumen lebih luas. Hal ini jika terus berlanjut akan dapat meningkatkan perekonomian Negara Karena semakin banyaknya *e-commerce* pendapatan pajak yang diterima Negara akan semakin meningkat.

Penelitian tentang variable kepatuhan terhadap wajib pajak dengan *e-commerce* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti penelitian

[15] "DAFTAR UMKM KOTA SEMARANG," *07 Maret*, last modified 2022, accessed March 11, 2022, https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/.

Shintia Betra Yana tahun 2021, hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa Peraturan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi pada tahun 2021 menghasilkan kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*. Penelitian Rifa Arbangatin Hasanah tahun 2016 menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Dan penelitian Cintya Caroline tahun 2021 menyimpulkan bahwa Tarif Pajak, Pemahaman perpajakan, Sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, tarif pajak yang berlaku adil sesuai keadaan perekonomian negara membuat wajib pajak paham dan patuh untuk membayar kewajiban pajak, sanksi perpajakan memberikan ancaman kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajak serta kesadaran wajib pajak oleh warga Negara membantu meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak. Dengan begitu peneliti memutuskan untuk mengambil variabel penelitian yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan lebih spesifikasi dengan pengambilan sampel pada pemilik usaha UMKM yang menjadi mitra *ShopeeFood* yang berada di Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam bentuk skripsi yang berjudul: ***"PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN TRANSASAKSI E-COMMERCE***

PADA PELAKU UMKM SHOPEEFOOD (Studi Kasus Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peniliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce.*
2. Untuk menguji secara empiris tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce.*
3. Untuk menguji secara empiris sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce.*
4. Untuk menguji secara empiris kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce.*

Adapun hasil dari penelitian, diharap dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti khususnya pada bidang perpajakan di Indonesia, dan diharapkan dapat menambah wawasan.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi pembaca, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce* pada merchant *ShopeeFood.*
   b. Bagi wajib pajak pemilik usaha UMKM, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
   c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi ajang penentu langkah strategi selanjutnya yang akan digunakan dalam mengatasi permasalahan pajak dengan transaksi *e-commerce* dan mempertimbangkan potensi pajak agar lebih optimal sebagai pendapatan Negara.
   d. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi ajang ahir yang digunakan dalam memenuhi strata satu jurusan Akuntansi Syariah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini disajikan dalam lima bab. Dimana masing-masing bab disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat beserta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, metode, skala pengukuran dan variabel dan indikator penelitian serta analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, penyajian data, serta analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi merupakan suatu proses penilaian terhadap suatu penyebab, yang dilakukan individu pada berbagai peristiwa yang terjadi, baik disadari maupun tidak disadari[16]. Setiap orang lain memiliki kecenderungan untuk menilai terhadap apa yang mendasari perilaku orang lain ataupun diri sendiri dalam melakukan suatu hal.

Pencetus awal teori Atribusi adalah Fritz Heider pada tahun 1958, yang merupakan seorang psikolog dari Jerman. Teori atribusi menggambarkan suatu proses bagaimana menentukan motif dan penyebab dari sikap seseorang[17]. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Samsuar pada tahun 2019 atribusi terdiri dari 3 dimensi yaitu:

1. Lokasi Penyebab, masalah yang paling umum dalam sebab akibat adalah apakah suatu peristiwa atau tindakan tertentu disebabkan oleh keadaan internal (atribusi internal) atau atribusi eksternal.
2. Stabilitas, dimensi sebab akibat yang kedua berkaitan dengan pertanyaan apakah penyebab peristiwa tersebut stabil atau tidak. Suatu stabilitas dikatakan permanen atau berubah-ubah dikarenakan suatu penyebab.
3. Pengendalian, dimensi yang terahir berkaitan terhadap pertanyaan apakah sebuah perilaku dapat dikendalikan atau tidak oleh individu[18].

---

[16] Samsuar, "Atribusi," *Jurnal Network Media* Vol: 2 No. (2019): 66.

[17] Bayu Aji Saputra, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Keikhlasan Wajib Pajak, Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kudus)," *Skripsi: UIN Walisongo* (2021): 10–11.

[18] Samsuar, "Atribusi."

Teori ini mengungkap bagaimana orang lain menjelaskan penyebab perilaku seseorang, baik diri sendiri atau orang lain berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku seseorang yang disebabkan oleh kekuatan internal yaitu perilaku yang dibawah kendali pribadi orang itu sendiri atau berasal dari kepribadian, kesadaran dan kemampuan, hal tersebut dinamakan Atribusi internal[19]. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang terjadi karena adanya tekanan atau situasi tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang[20]. faktor eksternal tersebut berupa atribusi eksternal, faktor yang berasal dari lingkungan atau dari luar kendali pribadi diri sendiri.

Teori atribusi sangat relevan dalam menilai kepatuhan wajib pajak yang erat kaitannya terhadap sikap wajib pajak dalam penilaian pajak itu sendiri. Peneliti menggunakan teori atribusi karena dalam studi kasusnya tertuju kepada pelaku usaha UMKM dengan *e-commerce* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam teori ini faktor internal sangat ditekankan pada kepribadian diri sendiri, yaitu pemahaman peraturan perpajakan dari wajib pajak itu sendiri, dan *self assessment system*. Sedangkan pengukuran dari faktor eksternal yaitu tarif pajak dan sanksi pajak yang telah ditegakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak. Dengan begitu, sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat bergantung pada keputusan pribadi dan lingkungan.

2.1.2 *E-Commerce*

2.1.2.1 Pengertian *E-commerce*

Ekonomi berbasis elektronik atau yang biasa disebut dengan *E-commerce* merupakan salah satu penopang perekonomian dan pendapatan Negara. Dalam PP No.74 Tahun 2017 mengenai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-commerce*)

[19] Rachmawati Meita Oktaviani and Sheila Adellina, "Kepatuhan Wajib Pajak Ukm," *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, ISSN: 2302-8556* 5, no. 2 (2016): 136–145.

[20] Saputra, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Keikhlasan Wajib Pajak, Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kudus)."

merupakan optimalisasi pemanfaatan potensi, sehingga pemerintah perlu mempercepat pengembangan, peluncuran dan penciptaan bisnis *e-commerce* serta mempercepat logistic dengan membentuk peta system perdagangan nasional berbasis elektronik yang terintegrasi.

Menurut penelitian Susilowati pada tahun 2019, *E-commerce* merupakan arena yang berisikan atas aktivitas transaksi dan pertukaran informasi, hal tersebut terjadi dikarenakan terhubungnya jutaan computer dalam satu jaringan yaitu internet[21]. *Electronic commerce* yaitu mekanisme transaksi jual beli atau perdagangan dengan menggunakan peralatan elektronik dan komunikasi yang dilakukan secara *online.* Secara umum terdapat 4 model *e-commerce* yang ditentukan Ditjen pajak pada lampiran surat edaran Nomor SE 62/PJ/2013 mengenai penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi *E-commerce* yaitu *Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals,* dan *Online Retail*[22].

2.1.2.2 Klasifikasi *E-commerce*

Penggolongan *E-commerce* yang lazim dilakukan oleh orang ialah berdasarkan sifat transaksinya, yaitu:

1. C2B (*Customer to Business*), pembeli melakukan permintaan kepada produsen tentang kebutuhannya, dan pihak produsen akan mengajukan untuk pembuatan produk sesuai dengan kebutuhan tersebut.
2. C2C (*Costomer to Costomer*), merupakan seorang pembeli yang terlibat langsung dalam proses pembelian.
3. B2B (*Business to Business*), merupakan perdagangan yang melibatkan antar perusahaan.
4. B2C (*Business to Customer*), merupakan perdagangan yang diberikan secara eceran untuk konsumen[23].

---

[21] Tati Handayi, Alia Engka Nadita Putri, "Keputusan Pembelian E-Commerce Shopee Pada Generasi Milenial Di Kecamatan Johar Baru," *JSMB* Vol.8(2) (2021): 37.

[22] Hastanti Agustin Rahayu and Hanafi Adi Putranto, "Pajak E-Commerce Di Indonesia," *Publikasi Ilmiah UMS* (2019): 871–881, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11420.

[23] Halimah Putriani, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Pemahaman Dan Self Assesment System Pajak E-Commerce Terhadap Kepatuhan Pelaku Bisnis E-Commerce Dalam Membayar Pajak Di Shopee," *IAIN Tulungagung* (2021): 24–25.

2.1.2.3 Mekanisme Transaksi *E-commerce*

Mekanisme transaksi *E-commerce* bermula dari penjual yang memposting barang dagangannya, kemudian ketika ada salah satu konsumen yang minat maka konsumen tersebut dapat melanjutkan ketahap pembayaran yang mekanisme tergantung oleh masing-masing penjual. Salah satunya yang sudah disediakan oleh penyedia platform itu sendiri. Misal platform Shopee yang telah menyediakan sistem pembayaran melalui dompet digitalnya yaitu *shopepay*. Akan tetapi transaksi yang dilakukan tidak hanya bisa melalui *shopepay* saja, system transaksi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

a. Pembayaran yang disediakan melalui transfer ATM
b. Pembayaran melalui Alfamart/ Indomart
c. Pembayaran melalui *shopepaylatter* (beli sekarang, bayar bulan depan)
d. *Micropayment* (recehan), dan
e. Anonymous digital cash[24].

Apabila proses pembayaran tersebut telah berhasil melalui salah satu yang telah disediakan, maka barang yang dijual siap dikirimkan kepada konsumen dengan system pengirimannya sesuai dengan produknya masing-masing. Contohnya pembelian *Ebook* jadi proses pengirimannya langsung didwonload.

2.1.3 Shopee

PT Shopee International berdiri pada tahun 2009 dan masuk pertama kali di Indonesia tahun 2015. Pada tahun 2017 platform Shopee mencatat unduhan di play store mencapai 80 juta jiwa dan mempunyai pengguna

[24] Rifa Arbangatin Hasanah, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shoping)," *Skripsi UIN Maulana Malik Raden Ibrahim* (2016): 20.

active lebih dari 180 juta dan mempunyai pengusaha yang bekerjasama dalam *e-commerce* Shopee lebih dari 4 juta[25].

Shopee merupakan salah satu *e-commerce* yang berkembang dengan pesat. Shopee juga membawa pengalaman berbelanja dengan model baru dan memfasilitasi penjual serta pembeli dengan pengetahuan yang mudah dipahami. Shopee merupakan *e-commerce* yang sedang naik daun dengan pengunjung aktif nya mencapai 28,35 juta jiwa sampai bulan Agustus 2021[26].

E-commerce shopee kini hadir di Indonesia dengan fitur barunya yaitu pesan antar makanan *online* (*food delivery*) dengan iconnya yang terletak didalam aplikasi bernama *ShopeeFood* yang resmi diluncurkan pada bulan Januari 2021. Kemunculan *ShopeeFood* memberikan peluang bagi pelaku UMKM dibidang kuliner, karena *ShopeeFood* merekrut berbagai UMKM yang mau bekerjasama menjadi mitra. Dengan adanya fitur-fitur pada *ShopeeFood* seperti *cahsback*, gratis ongkir, promo, dan *discount* yang mencapai 70% sehingga menarik minat masyarakat yang suka dalam bidang kuliner[27]. Hal tersebut membuat UMKM banyak yang tertarik menjadi merchant *ShopeeFood* karena dapat memicu naiknya pendapatan. Semakin banyak peminatnya maka akan semakin banyak penghasilan yang akan didapatkan.

2.1.3.1 Cara Berjualan di *ShopeeFood*

Tata cara berjualan di *ShopeeFood* tidaklah hal yang sulit dilakukan, karena Shopee telah memberikan pembelajaran terlebih dahulu bagi para pelaku UMKM yang ingin berjualan atau menjadi mitra *ShopeeFood*. Berikut tata cara berjualan di *ShopeeFood* yaitu:

a. Mematuhi Aturan *ShopeeFood*

---

[25] Wiwiek Mardawiyah Daryanto, Putri Tresna Meiliawati, and Tesha Syarafina, "The Financial Impact Of Conventional Retail Industry Due To Online Based Shoping Model In Indonesia (Case Study Of PT MATAHARI Top 10 Rising E-Commerce Countries," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 21, no. 2 (2020): 26–37.

[26] Jakarta, "Siapa Yang Jadi E-Commerce No. 1 Indonesia Tahun Ini?"

[27] Khomariyah, "Peluang Bisnis Makanan Dan Minuman Di Shopee Food Bagi UMKM."

ShopeeFood tentunya telah memiliki kebijakan-kebijakan mengenai makanan apa saja yang boleh atau tidak boleh dijual, kita senantiasa harus mematuhi aturan tersebut. Jika tidak, akun patner kita bisa diblokir oleh pihak manajemen platform dan membuat rating bisnismu akan turun.

b. Selalu Update Informasi

ShopeeFood akan selalu menginformasikan melalui aplikasi masing-masing tentang event yang akan datang. Sebagai pelaku UMKM yang menjadi merchant harus selalu update dan ikut serta dalam event dalam memberikan diskon dan promo kepada konsumen karena hal tersebut memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap konsumen sehingga bisnis akan laris.

c. Menyediakan Kemasan Makanan Yang Berkualitas

Dengan memberikan kemasan yang berkualitas serta higenis membuktikan bahwa kita memberikan perhatian penuh terhadap konsumen.

2.1.4 Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh masayarakat pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa didasari oleh Undang-Undang, yang digunakan untuk keperluan Negara untuk kepentingan rakyatnya.

Menurut penelitian Rochmat pajak adalah iuran dari rakyat yang diberikan untuk Negara dengan dasar Undang-Undang Perpajakan dan tidak mendapat imbalan secara kontan serta digunakan untuk keperluan public[28]. Pajak adalah sumber penghasilan Negara yang sangat penting

[28] Janatin Fitriyani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Reliugisitas Terhadap Kepatuhan Wajib (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)," *Skripsi: UIN Walisongo* (2019): 15.

fungsinya bagi kehidupan perekonomian, karena hasil dari pendapatan pajak dikeluarkan salah satunya untuk pembangunan dan membiayai seleuruh pengeluaran Negara. Pajak merupakan peralihan kekayaan oleh rakyat untuk kas Negara yang bersifat memaksa guna membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya.

2.1.4.2 Pajak Dalam Perspektif Islam

Pajak dalam istilah islam berupa *kharaj* (pajak tanah/ tanaman), *usyur* (pajak perdagangan/ bea cukai), dan *jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup didalam naungan Negara/ pemerintah Islam). Pajak juga dikenal dengan sebutan *Al-Maksayu Adh-Dharibah* yang mempunyai arti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak. Pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi, pertama penerimaan hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efesien untuk mencapai tujuan pajak, kedua pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.

Kepatuhan dalam kewajiban membayar pajak sudah diterapkan oleh pemerintah bagi seorang muslim yang bernegara. Sama halnya dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang telah diperintahkan oleh agama, meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk non muslim[29]. Pajak dalam islam diperlakukan secara adil dan selaras berdasarkan nilai-nilai ajaran islam dan digunakan untuk kemaslahatan bersama.

[29] Muhammad Turmudi, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adl* 8, no. 1 (2015): 136–137.

Allah Berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 41

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan yang merasa ringan maupun berat dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu dijalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui[30].

Surat At-Taubah:41 diatas menjelaskan bahwasanya masyarakat dianjurkan untuk mengeluarkan hartanya dijalan yang baik dan benar. Begitu pula dengan pemungutan pajak, pemungutan pajak memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, jadi pemungutan pajak diperbolehkan selama tidak merugikan rakyat.

2.1.4.3 Unsur Pajak

Pajak tentunya memiliki unsur-unsur yang melekat pada konsep pajak itu sendiri yaitu meliputi:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya memiliki sifat dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh Negara bagian pusat dan daerah.
3. Pajak dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah, yang digunakan untuk mendanaiinvestasi publik ketika terjadi surplus pendapatan.
4. Pajak memiliki tujuan selain anggaran, yaitu mengatur *(regulered)*[31].

2.1.4.4 Fungsi Pajak

Agar tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera, pajak memiliki peranan fungsi-fungsi yang dapat menunjang tercapainya hal tersebut, terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Anggaran

---

[30] *Q.S At Taubah : 41*.

[31] Waluyo, *Perubahan Perundang-Undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama* (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

Fungsi anggaran artinya pajak mempunyai fungsi atau alat sebagai instrument untuk memasukan dana ke kas Negara yang sebesar-besarnya. Jadi pajak menjadi alat sebagai pemindahan kekayaan oleh rakyat untuk kas Negara.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya terhadap pemungutan pajak barang mewah akan dikenai biaya pajak yang tinggi.

2.1.4.5 Jenis Pajak

Terdapat beberapa pengelompokan pajak, yaitu sebagai berikut:

A. Menurut Administrasi Perpajakan

Dalam administrasi perpajakan Digolongkan lagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Langsung, dari segi yuridis pajak yang dipungut secara periodik (dalam kurun waktu satu tahun atau setiap masa pajak).
2. Pajak Tidak Langsung, Pajak yang ahirnya dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga.

B. Menurut Sifat Pajak

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang penetapannya melihat pada keadaan pribadi wajib pajak .
2. Pajak Objektif, Pajak yang pemungutannya berdasarkan pada objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan seseorang berkewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal[32].

C. Menurut Lembaga Pemungutan Pajak

1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

[32] Farida Yulianti, "Jenis Dan Fungsi Pajak," *2020*, 2020.

2. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah[33].

2.1.4.6 Subjek Dan Objek Pajak

Subjek Pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditujukan untuk orang pribadi atau badan yang didasakan oleh peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Subjek pajak yang berada dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri berupa orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban pajak serta menjadi wajib pajak yang memperoleh objek pajak. subjek pajak terdapat 2 jenis, yaitu:

1) Subjek pajak dalam negeri

   Subjek pajak dalam negeri yaitu meliputi salah satu hal dibawah ini:

   a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
   b. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia melebihi 183 hari kurang lebih dalam kurun waktu 12 bulan, atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan orang pribadi yang berniat tinggal di Indonesia.
   c. Badan yang telah didirikan di Indonesia.
   d. Warisan yang tidak terbagi sebagai serikat pekerja menggantikan ahli waris.

2) Subjek pajak luar negeri

   Subjek pajak luar negri yaitu salah satunya dibawah ini:

   a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat di Indonesia namun tidak melebihi 183 hari dalam jangka 12 bulan, yang menjalankan usaha di Indonesia atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.
   b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha tetap di Indonesia.

[33] Fitriyani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Reliugisitas Terhadap Kepatuhan Wajib (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)."

c. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam waktu 12 bulan, yang mendapat pengahasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
d. Perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, dan bukan penduduk yang memperoleh penghasilan dari Indonesia selain melakukan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.

Sedangkan Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikarenakan undang-undang dapat dikenakan pajak dalam arti objek pajak boleh dikenakan pajak dan tidak boleh dikenakan pajak. Oleh karena itu penentuan objek pajak harus dilakukan sebuah penelitian terlebih dahulu sehingga dapat menciptakan kemanfaatan untuk Negara maupun daerah selaku pihak yang membutuhkan pajak.

2.1.4.7 Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Official Assesment System

Merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang, memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Kewewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar kepada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. kewajiban perpajakan muncul setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

b. *Self Assesment System*

Sistem ini berupa sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayarnya. Memiliki Ciri-ciri sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak.
2. Wajib pajak aktif dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh wajib pajak terutangnya.
3. Fiskus hanya menjadi seorang pengawas.

c. *Withholding System*

system ini dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak yang terutang) guna memotong atau memungut besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu: wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh pihak ketiga[34].

2.1.5 Pajak UMKM

Dalam mendorong perekonomian Negara yang salah satu penerimaan pendapatannya dari sector pajak dengan itu pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 Yang menurunkan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi tarif pajak final sebesar 0,5% (setengah persen) dikali omzet per bulan, dalam hal ini omset tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam setahun dan ditetapkan pengusaha kena pajak jika omzet melampaui Rp. 4,8 Miliar. Dengan tarif tersebut pemerintah memiliki tujuan yaitu untuk menumbuhkan daya saing dengan produk-produk impor diera digital sekarang.

Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan memiliki perbedaan pada berbagai subyek pajak. Pertama subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka 7 tahun. Kedua, subyek pajak badan usaha berbentuk perseroan terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terahir, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk CV, Firma, dan

[34] Muhammad Nur, Reza Mustagfaran, and (Universitas Nasional), "Analisis Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Subjek Dan Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Tebet," *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 40, no. 1 (2016): 5601–5635.

Koperasi selama 4 tahun. Jangka waktu tersebut dihitung mulai dari tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak lama, dan sejak tahun pajak terdaftar bagi wajib pajak baru.

2.1.6 Peraturan Pajak *E-commerce*

Indonesia memiliki road map *e-commerce* yang mengatur terkait perizinan, perpajakan, pemegangan, dukungan terhadap *e-commerce*. Road map *e-commerce* juga mengatur perlindungan kepada masyarakat. Hal itu tertuang dalam *road map* sistem perdagangan berbasis elektronik Nasional (*e-commerce road map*) 2017-2019 Peraturan Presiden (Perpres) No. 74/2017. Implementasi perpajakan *e-commerce* diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 mengenai Perlakuan Perpajakan atas transaksi perdagangan dengan Sistem Elektronik yang berlaku efektif 1 April 2019. Sasaran dalam PMK Nomor 210/2018 untuk penyedia dan pedagang platform marketplace. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku *e-commerce*. Tujuan PMK ini untuk menciptakan kesetaraan di antara para pelaku ekonomi. Objek pajak pada PMK *e-commerce* adalah transaksi perdagangan yang terkait dengan platform marketplace pada pihak penyedia jasa, para pelapak dan pembelinya. Para penyedia jasa antara lain Lazada, Olx, Bukalapak, Tokopedia dan Shopee. PMK *e-commerce* hanya mewajibkan marketplace yang berbasis di Indonesia.

PMK 210/2018 memperhitungkan perlakuan yang sama terhadap *e-commerce* dengan perdagangan konvensional, serta kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku *e-commerce*. Undang-undang perpajakan terkait PMK 210/2018 antara lain UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang (PPN) dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Terdapat

dua cakupan pembatasan perpajakan untuk PMK 210/2018 *e-commerce*. Pertama, pajak penghasilan atas PPN, PPnBM, dan transaksi didalam daerah pabean. Kedua, Bea Masuk dan/atau PDRI atas Impor Barang[35].

2.1.7 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah persentase yang digunakan berdasarkan acuan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 Yang memiliki tarif pajak UMKM 1% menjadi tarif pajak final sebesar 0,5% (setengah persen) dikali omzet per bulan, dalam hal ini omset tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam setahun dan ditetapkan pengusaha kena pajak jika omzet melampaui Rp. 4,8 Miliar. Tujuan Dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013 yaitu terciptanya kemudahan bagi masyarakat yang melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi control sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. dengan harapan penerimaaan pajak menjadi meningkat sehingga tingkat kemakmuran dan mensejahterakan rakyat juga meningkat. Akan tetapi Dengan adanya Aspek keadilan yang merupakan salah satu kontra yang terjadi mengingat pajak penghasilan PP No. 46 Tahun 2013 yang termasuk pajak final. Pajak yang bersifat final yang tidak memandang apakah hasil ahir dari usaha tersebut menghasilkan laba atau rugi. Sehingga pemerintah menerbitkan kembali PP No. 23 Tahun 2018 untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Berikut yang tidak termasuk dari peredaran bruto, yaitu:

1. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima diperoleh dari luar negeri.

[35] Rahayu and Putranto, “Pajak E-Commerce Di Indonesia.”

3. Usaha atas penghasilan telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri[36].

Terdapat berbagai macam tarif yang dapat digunakan oleh suatu Negara sebagai acuan dalam perhitungan dan penetapan pajak, yaitu:

1. Tarif Tetap

   Tarif pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Proporsional

   Tarif pajak yang menggunakan persentase tetap terlepas dari basis pajaknya. Besarnya pajak yang dibayarkan sebanding dengan DPP. Semakin tinggi DPP semakin tinggi pajak yang dibayarkan.

3. Tarif Progresif

   Tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat.

4. Tarif Degresif

   Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil apabila dasar pengenaan pajak DPP menurun.

5. Tarif *Ad Valerom*

   Tarif pajak yang menggunakan persentase tertentu yang dikenakan pada harga atau nilai suatu barang. Salah satunya yaitu bea masuk (bea impor).

6. Tarif Spesi K

   Tarif pajak dengan jumlah tertentu atau sesuatu jenis tertentu atau satuan jenis barang tertentu yang sama dengan spesifikasinya[37].

---

[36] Liminata, "Analisis Peraturan Pajak E-Commerce, Tarif Pajak E-Commerce, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Dengan Sistem E-Commerce."

[37] Ilfi,"Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" Jakarta, UIN Syarif Hidayatul
lah, 2020, h. 19-21.

2.1.8 Sanksi Pajak

Arti dari kata Sanksi itu sendiri yaitu sebuah tindakan atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan. Karena peraturan atau Undang-Undang merupakan panutan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sedangkan sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak membayarkan hutang pajaknya. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan untuk tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan melaksanakan kewajibannya.

Menurut penelitian Mardiasmo pada tahun 2016 sanksi pajak adalah jaminan bahwasanya ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan ditaati dan dipatuhi. Dengan begitu sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat dua macam sanksi, yaitu:

a) Sansksi Administrasi

Berdasarkan pendapat Mardiasmo sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada Negara, berupa bunga, kenaikan dan denda[38]. Menurut UU KUP 2007 sanksi administrasi atas 3 macam sebagai berikut:

1. Sanksi Denda

   Sanksi yang timbul dikarenakan wajib pajak melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan.

2. Sanksi Bunga

   Sanksi tersebut muncul karena wajib pajak melanggar peraturan yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran pajaknya.

3. Sanksi Kenaikan

[38] Jordan Dolasais, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce," *Skripsi, Institut Bisnis dan Informatika KWIK KIAN GIE* (2020): 21–22.

Sanksi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar karena wajib pajak atas pelanggaran yang telah diatur diatas material.

b) Sanksi Pidana

Menurut UU KUP 2007 sanksi pidana ada 3 macamnya yaitu sebagai berikut:

1. Denda Pidana

   Sanksi yang dikenakan atas tindakan pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan. Sanksi ini berlaku untuk wajib pajak, pejabat dan pihak ketiga yang melanggar norma.

2. Pidana Kurungan

   Pidana yang ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Ketentuan denda pidana dapat diganti dengan pidana kurungan.

3. Pidana Penjara

   Pidana yang berupa hukuman penjara, denda pidana penjara diancamkan kepada pelanggaran yang bersifat kejahatan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ashr: 3, yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ

Artinya: Kecuali Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran[39].

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman di anjurkan untuk saling menasehati. Sedangkan dalam perpajakan mengacu pada pemberian surat peringatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

[39] *Q.S Al Ashr: 3*, n.d.

2.1.9 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengerti atau mengetahui perihal hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak *(Tax Consciouness)* yaitu wajib pajak yang secara sukarela menyumbangkan dananya dengan membayar kewajiban perpajakan tepat pada waktunya. Dengan terbentuknya pembayaran kewajiban pajak yang tepat dapat berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak.

Tingkat dari kesadaran perpajakan seseorang menunjukan seberapa besar tingkat pemahamannya mengenai arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin membaik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak[40].

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah Ayat 1, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghahalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang ia kehendaki[41].

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya umat islam diwajibkan menunaikan kewajiban dengan harta yang telah mereka miliki. Allah SWT berjanji memberikan imbalan pahala berlimpah apabila mereka menginfaqkan hartanya. Maka dari itu, masyarakat wajib sadar dalam

[40] Yana, "Pengaruh Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi E-Commerce Di Shopee Pada Distributor Masker Jakarta Timur."

[41] *Q.S Al Maidah: 1*, n.d.

membayar pajaknya. Karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi *E-commerce*

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi suatu kewajiban bagi wajib pajak atau badan. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak membuat pendapatan pajak meningkat sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan sangat mudah. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap kepatuhan seorang wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya sendiri berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Kepatuhan wajib pajak akan menimbulkan manfaat bagi fiskus maupun wajib pajak itu sendiri. Menurut penelitian Rahayu tahun 2013 kepatuhan wajib pajak ada dua macam, yaitu:

1. Kepatuhan formal, suatu keadaan disaat wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Peraturan Perpajakan.
2. Kepatuhan material, suatu keadaan sdimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. kepatuhan material juga bisa meliputi material formal.

Menurut Undang-Undang KUP dalam penelitian Suandy tahun 2014 kepatuhan wajib pajak secara formal, sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
2. Kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan.
3. Kewajiban untuk membayar atau menyetor pajak.
4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak[42].

[42] Dolasais, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce."

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah pencarian karya-karya sebelumnya berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan untuk menghindari duplikasi atau plagiarisme. Penelitian terdahulu mengenai variable Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Transaksi *E-commerce* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Berdasarkan penelitian Shintia Betra Yana pada tahun 2021 dengan judul "Pengaruh Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Dengan Transaksi *E-commerce* Di Shopee Pada Distributor Masker Jakarta Timur", hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi pajak dan tarif pajak tidak berpegaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi tahun 2021 yang berjudul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *E-commerce",* dengan hasil penelitian bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*.

Pada tahun 2016 penilitian yang dilakukan oleh Rifa Arbangatin Hasanah tentang kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial pemahaman peraturan pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu variable pemahaman peraturan pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara parsial hanya variable pemahaman peraturan pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Cintya Caroline pada tahun 2021 tentang kepatuhan wajib pajak UMKM yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif tarif pajak, pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi

perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain secara parsial, penelitian secara simultan juga menunjukan hasil bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian lain oleh Halimah Putriani tahun 2021 tentang kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak di Shopee yang bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan pajak *e-commerce*, tingkat pemahaman pajak *e-commerce*, dan tingkat *self assessment system* pajak *e-commerce* terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak di Shopee serta untuk menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan, pemahaman dan *self assessment system* pajak *e-commerce* terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak di Shopee. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa pengetahuan pajak dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak di Shopee, *self assessment system* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak di Shopee. Pengetahuan, pemahaman dan *self assessment system* pajak *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam membayar pajak di Shopee.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri Dwi Indriyani pada tahun 2021 tentang kepatuhan pelaku *e-commerce* terhadap kewajiban perpajakan bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan hasil dari penelitian yang menunjukan pengaruh positif dan signifikan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan, serta sosialisasi

perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Nelsy Arisandy pada tahun 2017 mengenai kepatuhan wajib pajak yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak OP yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru. Dengan hasil pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak OP yang melakukan kegiatan bisnis *Online* di Pekanbaru.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Shintia Betra Yana (2021)	Pengaruh Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi *E-commerce* di Shopee pada distributor masker Jakarta Timur.	Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Peraturan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2.	Afeni Maxuel dan Anita Primasti	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan	Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan	Deskriptif Kuantitatif	sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap

	wi (2021)	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm *E-commerce*.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *E-commerce*		kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*
3.	Rifa Arbangatin Hasanah (2016)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Study Pengusaha Online Shopping).	Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Deskriptif dengan pendekatan survey melalui wawancara	pemahaman peraturan pajak, Tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara parsial hanya variable pemahaman peraturan pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Cintya	Pengaruh tarif	Tarif Pajak,	Kuantitatif	bahwa tarif

	Caroline (2021)	pajak, pemahaman perpajakan, mekaanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.		pajak, pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain secara parsial, penelitian secara simultan juga menunjukan hasil bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5.	Halimah Putriani (2021)	Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Pemahaman dan *Self Assesment*	Tingkat Pengetahuan, Pemahaman, *Self Assesment System* dan	Pendekatan Kuantitatif	pengetahuan pajak dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan

		System Pajak *E-commerce* Terhadap Kepatuhan Pelaku Bisnis *E-commerce* Dalam Membayar Pajak Di Shopee	Kepatuhan wajib Pajak		signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak di Shopee, *self assesment system* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak di Shopee. Pengetahuan, pemahaman dan *self assessment system* pajak *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam membayar pajak di Shopee.

6.	Putri Dwi Indriyani (2021)	pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaku E-commerce dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	Sosialisasi perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.	kuantitatif	pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan, serta sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

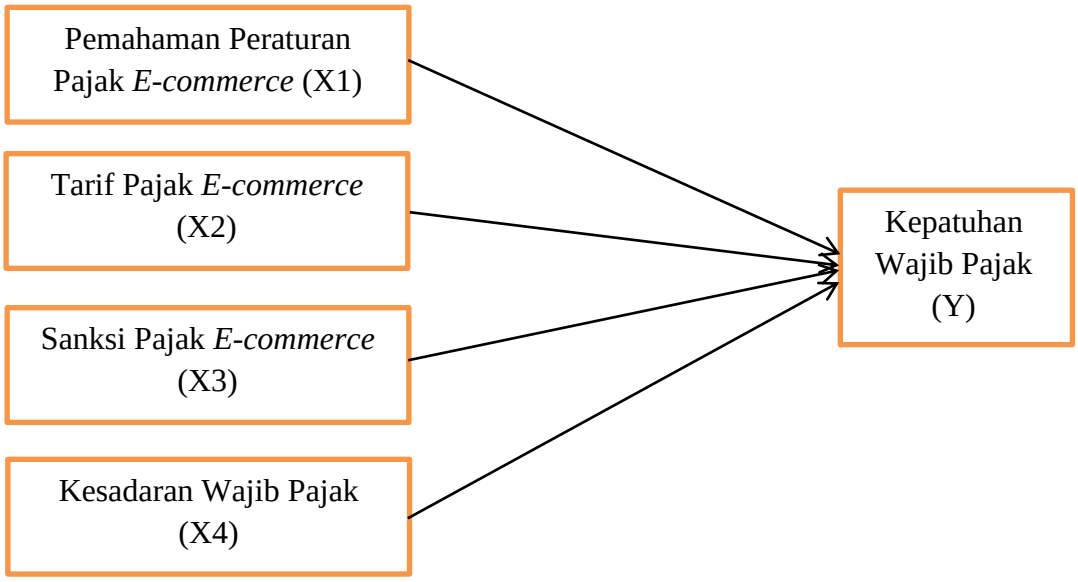
7.	Nelsy Arisandi (2017)	Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru.	Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak	kuantitatif	Pengaruh pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Teoritik

Dalam kerangka teoritik ini akan menjelaskan terkait variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, hal tersebut merupakan faktor-faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*. Kerangka Teoritik dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kerangka Teoritik



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak *E-commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman akan peraturan perpajakan dapat memicu berubahnya sikap dan perilaku wajib pajak, hal tersebut merupakan sebagian proses pendewasaan bagi wajib pajak melalui pembelajaran dan pelatihan. Pengetahuan terkait peraturan perpajakan dapat kita peroleh dari pendidikan formal maupun non formal yang dapat menumbuhkan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Menurut Teori Atribusi pemahaman mengenai peraturan pajak bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM *e-commerce* merupakan masalah internal yang dapat mempengaruhi tanggapan wajib pajak dalam membuat keputusan terkait kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Masyarakat yang paham akan peraturan perpajakan, senantiasa membayar pajaknya dengan sukarela tanpa paksaan serta sadar akan

kewajibannya sebagai warga Negara yang taat dan patuh dalam membayar pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shintia Betra Yana pada tahun 2021 menyatakan hasil bahwa variable pengaruh peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce*. Hal tersebut menunjukan bahwa pemahaman akan peraturan pajak mempunyai peran dalam kepatuhan wajib pajak pribadi maupun usaha *e-commerce.*

Semakin wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce* paham akan peraturan pajak, maka akan semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dari kesimpulan diatas maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H_1: Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Transaksi *E-commerce*.

2.4.2 Pengaruh Tarif Pajak *E-commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak adalah jumlah yang digunakan untuk menjadi acuan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Tarif yang dibayarkan sesuai dengan penghasilan yang telah didapat oleh wajib pajak. Jika terdapat perubahan besaran tarif dengan penghasilan maka akan terjadi perubahan pada jumlah besaran pajak yang terutang.

Menurut PP No 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, perubahan tarif pajak final menjadi 0,5% yang pelaksanaanya diatur dalam peraturan menteri keuangan republic Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018. Sehingga dengan ketentuan tarif pajak final yang telah diturunkan dapat membuat wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce* patuh dalam membayar pajak.

Dalam teori atribusi, kekuatan eksternal merupakan perilaku yang terjadi karena tekanan atau situasi dari luar yang akan memberikan pengaruh kepada perilaku seseorang. Salah satu kekuatan eksternal yang berasal dari lingkungan adalah aturan pemerintah. Tarif pajak menjadi

salah satu masalah eksternal bagi wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce*. Berdasarkan persepsi dari wajib pajak mengenai tarif pajak yang semakin kecil tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah maka pajak yang akan dibayarkan semakin sedikit. Hal tersebut akan mengurangi pengeluaran untuk membayar pajak dan akan menguntungkan usahanya dengan begitu kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar kewajiban pajaknya akan semakin meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cintya Caroline tahun 2021 menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce*. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Khaerun Nadhor DKK pada tahun 2020 bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_2: Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi *E-commerce*

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak *E-commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan[43]. Sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, semakin besar kesalahan yang dilakukan wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce* maka semakin berat sanksi yang akan diberikan.

Sanksi pajak memiliki tujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Maka dengan begitu pemerintah perlu menetapkan kebijakan sanksi pajak yang tegas supaya wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce.*

[43] Stefani Yurike Hidayat, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shop)," *Skripsi, Universitas Katolik Darma Cendika* (2019): 29.

Dalam teori atribusi Sanksi Pajak juga yakni masalah eksternal yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya sanksi pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak pelaku usaha *e-commerce* dalam kepatuhan membayar pajaknya. Karena semakin berat sanksi yang diberikan membuat wajib pajak takut melanggar dan akan senantiasa patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting pada tahun 2013 menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian didukung dengan penelitian Nelsi Arisandy pada tahun 2017 bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online*. Sehingga hipotesis yang disimpulkan sebagai berikut:

H_3: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi *E-commerce*

2.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap moral yang membantu mendukung perekonomian Negara dan berusaha untuk mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Negara serta dapat dipaksakan[44]. Dengan begitu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang sudah menyadari dan patuh terhadap pajak tentu akan membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai jumlah berdasarkan aturan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Kesadaran wajib pajak yang rendah dapat berdampak pada penurunan kepatuhan wajib pajak.

---

[44] Kadek Juniati Putri1 Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur" 18 (2017): 1112–1140.

Dalam teori atribusi kesadaran wajib pajak merupakan suatu masalah yang berdasarkan faktor internal yaitu kekuatan yang ada pada diri sendiri. Kesadaran wajib pajak terlihat dari diri sendiri sehingga setiap wajib pajak dapat mengerti mengenai pajak tanpa adanya tuntutan dari pihak luar. Dengan hal itu ketika wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce* memiliki kesadaran secara penuh dalam dirinya, maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri Dwi Indriyani tahun 2020 menunjukan bahwasanya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Didukung oleh penelitian Nurwahida Dkk yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*. Dengan begitu kesimpulan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_4: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektifitas desain penelitian ini dilakukan dengan pengolahan angka-angka, pengolahan statistic, struktur dan percobaan terkontrol[45]. Dalam penelitian kuantitatif, uji hipotesis ini menggunakan statistic inferensi melalui beberapa teknik analisis yang relevan sesuai tujuan dan karakteristik data penelitian yang akan diteliti. Data yang digunakan dapat diukur dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi.

Pendekatan kuantitatif menitikberatkan pada peristiwa-peristiwa yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam kehidupan manusia yang disebut dengan variabel. Penelitian ini menjelaskan variabel pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce* pada merchant *ShopeeFood*.

3.2 Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survai atau observasi untuk mengumpulkan data langsung dari peneliti untuk menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam studi eksploratif, deskriptif dan kausal[46]. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat langsung dari wajib pajak pelaku UMKM dengan transaksi *e-commerce* pada merchant *ShopeeFood* di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan menyebar kuesioner.

---

[45] E. Bahrudin Asep Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014).

[46] Husna Laela Yusran Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT Desindo Putra Mandiri, 2017).

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan objek dan subjek yang digeneralisasi dan memiliki karakteristik tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya[47]. Populasi penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM yang menggunakan layanan *e-commerce* dan menjadi merchant *Shopeefood* yang melakukan usahanya diwilayah Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Sampel merupakan jumlah bagian dan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh populasi. Dengan jumlah populasi besar, peneliti tidak dapat mempelajari seluruh populasi karena keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Oleh karena itu peneliti akan menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut[48].

Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis *convinence sampling* menggunakan rumus *slovin. Non-probability sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel namun tidak dipilih secara acak. Sedangkan *convinence sampling* merupakan metode pengambilan suatu sampel mengikuti ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan hal tersebut. Jenis yang dipilih *Convinence sampling* berdasarkan kemudahannya dalam menemukan responden untuk dijadikan sampel. Besarnya sampel pada penelitian ini menggunakan Rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{495}{1 + 495(0{,}1)^2}$$

$$n = \frac{495}{5{,}95}$$

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017).

[48] Ibid.

$$n = 83{,}1932$$

$$n = 84$$

Pada perhitungan rumus diatas menggunakan kelonggaran 10% mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan yang ada. Dapat diketahui keterangan dari rumus diatas sebagai berikut:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi

maka hasil keseluruhan jumlah wajib pajak pelaku usaha dengan transaksi *e-commerce* pada merchant *ShopeeFood* yang ada di Tembalang berdasarkan perhitungan rumus diatas menunjukan jumlah sampel yang bisa digunakan sebanyak 84 wajib pajak pelaku UMKM dengan transaksi *e-commerce*.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. ketika metode mengacu pada metode yang dapat menunjukan penggunaannya melalui kuisioner, wawancara, observasi, tes, dokumentasi, dan sebagainya[49]. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kuesioner atau angket

Angket atau kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang diberikan kepada responden untuk memberikan jawaban pada pertanyaan yang telah diajukan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan melalui penyebaran kuesioner yang menjadi metode utama dalam memporeleh data dati wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak yang melakukan penjualan dengan transaksi *e-commerce* yang menjadi merchant *ShopeeFood*. Kuesioner yang disebar merupakan kuesioner tertutup yang

[49] Rina Hayati, "Pengertian Metode Pengumpulan Data, Jenis, Cara Menulis Dan Contohnya."

dimana responden hanya memberikan tanda centang pada pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan.

b. Study Pustaka

Peneliti mengumpulkan buku-buku akademik, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan, dan informasi lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

3.5 Skala Pengukuran

Pendapat atau tanggapan responden atas kuesioner dihitung dan dikumpulkan menggunakan pengukuran skala likert. Skala likert merupakan bentuk pengukuran yang digunakan pada sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang yang mengacu pada fenomena social[50]. pendapat responden pada umumnya diukur menggunakan skala likert yang menggunakan lima angka penilaian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Poin dengan simbol angka 5 sebagai jawaban Sangat Setuju (SS).
2. Poin dengan simbol angka 4 sebagai jawaban Setuju (S).
3. Poin dengan simbol angka 3 sebagai jawaban Kurang Setuju (KS).
4. Poin dengan simbol angka 2 sebagai jawaban Tidak Setuju (TS).
5. Poin dengan simbol angka 1 sebagai jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)[51].

3.6 Variabel dan Indikator Penelitian

Variable Independent atau variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi, menjelaskan dan menerangkan variable yang lain. Sedangkan varibel dependet merupakan variable yang dipengaruhi oleh varibel lain tetapi tidak dapat mempengaruhi variable yang lain. Definisi operasional merupakan pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Variable dependent pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) yang diukur menggunakan indicator mengacu pada penelitian Putri Dwi Indriyani tahun 2021. Variable

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).

[51] Yana, "Pengaruh Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi E-Commerce Di Shopee Pada Distributor Masker Jakarta Timur."

independent dalam penelitian ini berupa pemahaman peraturan pajak (X1) diukur menggunakan indicator yang mengacu pada penelitian Putri Dwi Indriyani tahun 2021, tarif pajak (X2) diukur dengan indicator yang mengacu pada penelitian Ilfi Laili Marabessy 2020, sanksi pajak (X3) diukur dengan indicator mengacu pada penelitian Putri Dwi Indriyani tahun 2020 dan kesadaran wajib pajak (X4) diukur dengan indicator yang mengacu pada penelitian Cintya Caroline tahun 2021. Dalam penelitian ini operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Variabel, Definisi, Indikator Dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi	Indicator	Skala Pengukuran Variabel Penelitian	Sumber Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Variabel Dependen	Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan seseorang dalam peraturan atau undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan.	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak 2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu 3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar 4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan	Skala Likert dengan 9 item pernyataan	Putri Dwi Indriyani (2021)

		pajak		
Pemahaman Peraturan pajak *e-commerce* (X1) Variabel Independen	Proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undangunda ng serta tata cara perpajakan dan menerapkan nya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2. Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	Skala Likert dengan 6 item pertanyaan	Putri Dwi Indriyani (2020)
Tarif Pajak *e-commerce* (X2) Variabel Independen	Tarif pajak merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak.	1. Penurunan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang. 2. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang. 3. Pemahama n Perhitungan pajak atas penghasilan karena	Skala Likert dengan 8 item pernyataan	Ilfi Laili Marasabessy (2020)

		adanya tarif pajak baru sebesar 0,5%		
Sanksi Pajak *e-commerce* (X3) Variabel Independen	Suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang bisa dikenakan dalam bentuk sanksi administrasi berupa denda maupun sanksi pidana.	1. Sanksi pajak yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat 2. Pengenaan sanksi pajak yang berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	Skala Likert dengan 5 item pernyataan	Putri Dwi Indriyani (2020)
Kesadaran Wajib Pajak (X4) Variabel Independen	Kesadaran Wajib Pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan dengan secara sadar menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri	1.Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan 2.Kesadaran bahwa dalam membayar, menghitung dan melaporkan pajak dengan secara suka rela 3.Kesadaran bahwa pajak	Skala Likert dengan 5 item pernyataan	Cintya Caroline (2021)

	pajak dengan benar dan sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk perwujudan fungsi pajak yaitu untuk pembiayaan negara.	merupakan bentuk partisipasi yang menunjang perekonomian Negara		

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis atau memberi gambaran pada data sampel yang sudah dikumpulkan. Tujuannya agar data menjadi ringkas dan mudah dilihat serta dimengerti. Analisis data yang digunakan yaitu menganalisis data yang ada dengan menggunakan analisis deskriptif dengan memberikan gambaran data mengenai jumlah data, minimum, maxsimum, mean, median dan standar deviasi dari masing-masing variable. Sedangkan Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce* pada merchant *ShopeeFood.*

3.7.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrument penelitian adalah proses yang harus dilakukan peneliti untuk menganalisis secara sistematis data yang terkait dengan subjek penelitiannya serta mempresentasikan hasil wawancara yang telah diperoleh dari orang lain. Analisis data mempunyai tujuan untuk

menemukan sebuah makna data melalui subjek pelakunya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menunjukan kevalidan suatu instrument penelitian. Uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah/ falid tidaknya kuesioner. Uji validitas memiliki kriteria untuk menghitung yaitu dengan cara membandingkan Nilai R_{hitung} (*Pearson Correlation*) dengan Nilai $R_{tabel.}$ Uji validitas dikatakan valid ketika mempunyai tingkat signifikasi dibawah 0,05 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan juga sebaliknya[52].

b. Uji Realibilitas

Realibilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi alat pengukur ketika mengukur peristiwa yang sama. Konsep dalam realibilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran yang digunakan bersifat tetap terpercaya serta terbebas dari galat pengukuran (*measurement eror*). Untuk menguji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan tingkat/ taraf signifikan melebihi 0,6 maka pertanyaan variable tersebut reliable dan jika nilai *Cronbach's Alpha* kurang daro 0,6 maka pertanyaan variable tersebut tidak reliable[53].

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu jenis pengujian prasyarat pada regresi linear berganda. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji dan menjamin kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam model ini, variabel terdistribusi secara normal bebas dari multikolonieritas

[52] Ibid.

[53] Budi Dharma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Realibilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)* (Guepedia, n.d.).

dan heteroskedastisitas[54]. Dalam uji asumsi klasik ini tahapan pengujian yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian untuk megetahui apakah sampel yang digunakan pulasi yang berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik merupakan data yang berdistribusi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila jumlah data yang diatas dan dibawah rata-rata adalah sama, begitu pula dengan simpangan bakunya[55]. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk mendeteksi distribusi normalitas data. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi dengan normal, tetapi jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal[56.]

3.8.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas masih merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Tujuan digunakan uji multikolonieritas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel bebas atau variabel independent. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menentukan variabel independen mana yang mempengaruhi variabel dependen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance dan dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF). Jika nilai Tolerance <0,10 dan nilai VIF >10, maka terjadi multikolinearitas dan jika nilai Tolerance >0,10 dan nilai VIF <10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

---

[54] Caroline, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."

[55] Nisrina Haniah, "Uji Normalitas Dengan Metode Liliefors," *Statistika Pendidikan*, no. 1 (2013): 1–17.

[56] Zuli N Ricki Yuliardi, *Statistika Penelitian Plus Totarial SPSS* (Yogyakarta: Innosain, 2017).

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dimana keadaan terjadinya ketidaksamaan varian residual pada model regresi. Heterokedastisitas dapat dideteksi ada atau tidaknya menggunakan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPERD (Nilai Prediksi) dengan SRESID (Nilai Residualnya).

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu peraturan pajak *e-commerce* (X1), Tarif Pajak *e-commerce* (X2), Sanksi Pajak *e-commerce* (X3), dan kesadaran wajib pajak *e-commerce* (X4) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Pengujian hipotesis pada analisis regresi linier berganda dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
a	= Nilai Intersep (Konstan)
b1, b2, b3, b4	= Koefisien Regresi
X1	= Peraturan Pajak *E-commerce*
X2	= Tarif Pajak *E-commerce*
X3	= Sanksi Pajak *E-commerce*
X4	= Kesadaran Wajib Pajak *E-commerce*
e	= Standar Eror

3.9.2 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk menguji sejauh mana model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien variasi antara nol sampai dengan satu. Jika nilai R^2 nol maka kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen terbatas, sedangkan

jika nilai R^2 mendekati satu maka hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi adanya variabel dependen.

3.9.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat[57]. Uji F digunakan untuk menguji simultan antara variabel pemahaman peraturan pajak *e-commerce* (X_1), Tarif Pajak *e-commerce* (X_2), Sanksi Pajak *e-commerce* (X_3) dan Kesadaran Wajib Pajak *e-commerce* (X_4) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak. Uji statistic F digunakan dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Quick look: apabila nilai F lebih besar dari pada 4, maka Ho dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F_{hitung} lebih besar dari pada nilai $F_{tabel,}$ maka Ho ditolak dan menerima Ha.

3.9.4 Uji t

Uji statistic t bertujuan untuk menguji hipotesis sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji-t digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan apakah variabel tersebut memilki pengaruh yang signifikan atau tidak. Berikut berbagai cara melakukan uji t:

a. Quick look, jika jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5% maka Ho yang bi= dapat ditolak

[57] Meiryani, "MEMAHAMI UJI F (UJI SIMULTAN) DALAM REGRESI LINEAR," *BINUS UNIVERSITY*.

jika nilai t lebih besar dari 4 (dalam nilai absolut). Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau P value < a =0,05 maka hipotesis alternative dapat diterima bahwa variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen.

b. Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau P value > a =0,05 maka hipotesis alternative dapat diterima bahwa variabel independen berpengaruh pada variabel dependen.

Berikut ketentuan dalam menentukan hasil uji t digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = n-1:

a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau p value < a =0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau p value > a =0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini secara empiris menguji mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi *E-commerce* pada pelaku UMKM *Shopeefood* di Kecamatan Tembalang. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan peneliti mencoba menganalisis data yang telah terkumpul dengan formulasi hipotesis yang telah ditentukan apakah akan diterima atau ditolak. Penelitian ini diitujukan untuk wajib pajak UMKM *shopeefood* yang berada di kecamatan Tembalang.

Kecamatan Tembalang merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Semarang dengan jumlah UMKM terbanyak urutan ke-2. Berdasarkan data iumk.semarangkota.go.id kecamatan Tembalang mempunyai jumlah UMKM sebanyak 1702, yang terdiri dari usaha kecil dengan jumlah 84 dan usaha mikro sebanyak 1618. Sebagian besar dari mereka, karena Tembalang merupakan lokasi yang strategis yang terdapat beberapa kampus sehingga dapat memberikan peluang guna meningkatkan pendapatan yaitu dengan berjualan makanan dan minuman. Contoh salah satunya yang banyak di jumpai yaitu pengusaha dengan outletnya yang khusus untuk berjualan seperti Minum, Segara, Dimsum-koe, Salad, Mie ayam Bakso, Ayam geprek, dll. Sebagian ada pengusaha yang menjadikan teras rumah sebagai tempat usaha UMKM mereka, seperti warung makan sederhana, penjual snack ringan dan tahu pletok. Estimasi pendapatan pelaku UMKM dapat dilihat dari tempat usahanya, contohnya usaha Minum yang mempunyai outlet sendiri dapat diperkirakan dalam satu bulan mempunyai omset mencapai Rp 15-20 juta. Sedangkan usaha yang memiliki tempat kurang strategis atau berjualan di depan rumah contohnya usaha Tahu pletok diperkirakan dalam satu bulan memiliki omset Rp 7,5-9 juta.

5.2 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden dalam penelitian ini menurut demografi responden. Demografi responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan dan kepemilikan NPWP.

Tabel 4.1

Demografi Responden

Karakteristik	Uraian	Jumlah Orang	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	55	65%
	Perempuan	29	35%
Pendidikan	SD	0	0%
	SMP	5	6%
	SMA/ Sederajat	47	56%
	Diploma	20	23%
	Sarjana	12	15%
Kepemilikan NPWP	Memiliki	59	70%
	Tidak memiliki	25	30%

Sumber: Hasil penelitian yang diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 mayoritas responden memiliki jenis kelamin laki-laki 65% dan sisanya 35% kelamin perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terahir SMA yaitu 56%, Diploma 23%, Sarjana 15% dan SMP 6% sedangkan tingkat pendidikan SD 0%. Terkait dengan kepemilikan NPWP responden yang memiliki NPWP sebesar 70% dan yang tidak atau belum ber-NPWP sebesar 30%. Dilihat dari besarnya pemilik NPWP Dapat disimpulkan

bahwa kepatuhan wajib pajak di kecamatan Tembalang terhadap kewajiban pajak akan mengalami peningkatan.

5.3 Teknik Analisis Data

5.3.1 Deskripsi Statistik

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan sampel pertanyaan yang telah disebar. Analisis deskriptif meliputi minimum, maximum, mean dan standar deviasi jawaban dari responden untuk tiap variabel. Statistik deskriptif menggambarkan persepsi para pelaku UMKM terhadap pernyataan yang telah diajukan atas tiap-tiap variabel. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Pajak (X_1)	84	20	30	24,32	1,977
Tarif Pajak (X_2)	84	25	33	28,85	2,321
Sanksi Pajak (X_3)	84	10	25	19,45	2,877
Kesadaran Wajib Pajak (X_4)	84	17	25	20,65	1,929
Kepatuhan wajib pajak (Y)	84	27	42	35,46	3,392
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistic (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, jumlah sampel penelitian (N) untuk setiap variabel adalah 84. Dengan hasil uji analisis deskriptif variabel pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce* pada pelaku UMKM *Shopeefood*. Jumlah sampel berdasarkan data diatas adalah 84. rata-rata variabel pemahaman peraturan pajak menunjukan angka sebesar 24,32 dengan nilai minimum 20, nilai maximum 30 dengan standar deviasi sebesar 1,977. Pada variabel tarif pajak menunjukan rata-rata sebesar 28,85 dengan nilai minimum sebesar 25 dan nilai maximum 33 dengan standar deviasi sebesar 2,321. Pada variabel sanksi pajak menunjukan rata-rata sebesar 19,45 dengan nilai minimum 10 dan nilai maximum 25 dengan standar deviasi sebesar 2,877. Variabel kesadaran wajib pajak menunjukan rata-rata 20,65 dengan nilai minimum 17 dan maximum 25 dengan standar deviasi sebesar 1,929. Pada variabel kepatuhana wajib pajak menunjukan rata-rata sebesar 35,46 dengan nilai minimum 27 dan nilai maximum 42 dengan standar deviasi sebesar 3,392.

5.4 Uji Kualitas Data

Sebelum data yang terkumpul dianalisis, terlebih dahulu data harus diuji kebenarannya. Adapun uji data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

5.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji setiap item pernyataan terkait variabel dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kevalidan setiap item pernyataan kuisioner. Pernyataan dikatakan valid apabila mampu menjawab sesuatu yang hendak diukur oleh peneliti.

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode *pearson product moment* yaitu dikataakan valid apabila memenuhi syarat $R_{hitung} > R_{tabel}$ yang artinya, dalam penelitian variabel yang digunakan terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Untuk mengetahui nilai R_{tabel} dalam penelitian ini maka, dapat ditentukan berdasarkan jumlah *N* atau responden sebesar 84 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai alpha

0,05 maka diperoleh nilai R_{tabel} sebesar 0.212. Adapun uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas

VARIABEL	PERNYATAAN	VALIDITAS		KET
		Rtabel	Rhitung	
Pemahaman Peraturan Pajak	$X_{1.}1$	0.212	0.779	VALID
	$X_{1.}2$	0.212	0.743	VALID
	$X_{1.}3$	0.212	0.540	VALID
	$X_{1.}4$	0.212	0.668	VALID
	$X_{1.}5$	0.212	0.606	VALID
	$X_{1.}6$	0.212	0.347	VALID
Tarif Pajak	$X_{2.}1$	0.212	0.722	VALID
	$X_{2.}2$	0.212	0.559	VALID
	$X_{2.}3$	0.212	0.670	VALID
	$X_{2.}4$	0.212	0.707	VALID
	$X_{2.}5$	0.212	0.578	VALID
	$X_{2.}6$	0.212	0.652	VALID

	$X_{2.}7$	0.212	0.646	VALID
Sanksi Pajak	$X_{3.}1$	0.212	0.875	VALID
	$X_{3.}2$	0.212	0.820	VALID
	$X_{3.}3$	0.212	0.859	VALID
	$X_{3.}4$	0.212	0.504	VALID
	$X_{3.}5$	0.212	0.765	VALID
Kesadaran Wajib Pajak	$X_{4.}1$	0.212	0.799	VALID
	$X_{4.}2$	0.212	0.719	VALID
	$X_{4.}3$	0.212	0.714	VALID
	$X_{4.}4$	0.212	0.380	VALID
	$X_{4.}5$	0.212	0.804	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak	Y	0.212	0.495	VALID
	Y	0.212	0.624	VALID
	Y	0.212	0.580	VALID
	Y	0.212	0.654	VALID
	Y	0.212	0.656	VALID

	Y	0.212	0.428	VALID
	Y	0.212	0.446	VALID
	Y	0.212	0.715	VALID
	Y	0.212	0.600	VALID

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistic (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukan hasil uji validitas tiap butir pernyataan dari variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan dikatakan valid apabila nilai Rhitung > Rtabel. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa elemen pernyataan setiap variabel dinyatakan valid karena semua pernyataan menghasilkan nilai Rhitung > Rtabel.

5.4.2 Uji Reliabilitas

Kuisioner dinyatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap pernyataan memiliki konsistensi dari waktu ke waktu. Artinya, ketika variabel ini diuji kembali dimasa yang akan datang maka akan menghasilkan kesimpulan dan jawaban yang sama. Pernyataan dikatakan reliabel jika setiap variabel penelitian memiliki *cronbach's alpha* > 0.60. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Hasil Uji Reabilitas

VARIABEL	*CRONBACH'S ALPHA*	N of ITEM	KET
Pemahaman Peraturan Pajak (X_1)	0.687	6	RELIABEL
Tarif Pajak (X_2)	0.769	7	RELIABEL
Sanksi Pajak (X_3)	0.827	5	RELIABEL
Kesadaran Wajib Pajak (X_4)	0.722	5	RELIABEL
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.751	9	RELIABEL

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistic (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukan hasil uji reliabilitas yang menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dengan nilai *cronbach's alpha* > 0.60. Artinya variabel dalam penelitian ini jika diuji kembali dimasa yang akan datang akan menghasilkan jawaban yang konsisten dan serupa.

5.5 Uji Asumsi Klasik

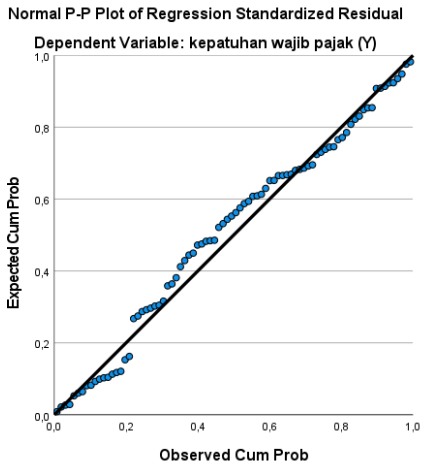
Uji asumsi klasik merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah didalam seebuah model *regresi linear Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik.

5.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Berikut uji normalitas menggunakan *probability Plot*:

Tabel 4.5

Probability Plot



Sumber : Data diolah IBM SPSS Statistic (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji normalitas dengan probability plot menunjukan bahwasanya hasil dari titik-titik mengikuti garis diagonalnya. Sehingga kesimpulannya model regresi berdistribusi dengan normal. Dengan Begitu, sebagai penguat bahwasanya model regresi benar-benar berdistribusi dengan normal berikut tahapannya melalui uji *kolmogorov-smirnov.*

Data dikatakan normal apabila memiliki nilai signifikan dalam uji *kolmogorov-smirnov* > 0.05. Hasil uji normalitas adapun pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistic (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji normalitas dengan menggunakan metode *One Sample Kolmogorov-smirnov* menghasilkan kesimpulan bahwa data penelitian dinyatakan berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikan 0.200 > 0.05. Artinya data populasi dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

5.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dalam persamaan regresi penelitian. Regresi linier dikatakan tidak bergejala heteroskedastisitas apabila mempunyai nilai sig > 0.05 dan apabila mempunyai nilai sig < 0.05 maka terjadi sebaliknya. dalam penelitian ini, hasil uji heteroskedastisitas dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Nilai Signifikansi
Pemahaman Peraturan Pajak	0.956
Tarif Pajak	0.978
Sanksi Pajak	0.359
Kesadaran Wajib Pajak	0.700

a. Dependent variable: Abs_Res

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistic (2022)

Tabel 4.7 menunjukan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan > 0,05. Artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

5.5.3 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen (bebas) terhadap variabel independen (bebas) lainnya. Model regresi dikatakan baik apabila memiliki nilai *VIF* < 10 dan

memiliki nilai *tolerance* > 0,1. Adapun hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabeel berikut ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolonieritas

VARIABEL	*Tolerance*	*VIF*
Pemahaman Peraturan Pajak (X_1)	0.956	1.046
Tarif Pajak (X_2)	0.899	1.112
Sanksi Pajak (X_3)	0.929	1.076
Kesadaran Wajib Pajak (X_4)	0.853	1.172

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistic (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji multikolonieritas menunjukan bahwa seluruh variabel independen (bebas) memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 artinya model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolonieritas.

5.6 Pengujian Hipotesis

5.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linear Berganda bertujuan untuk menguji pengaruh variabel indepnden terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9

Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,419	8,851		2,307	,024
Pemahaman Peraturan Pajak (X_1)	,088	,191	,051	,461	,646
Tarif Pajak (X_2)	,107	,167	,073	,639	,525
Sanksi Pajak (X_3)	,031	,133	,027	,236	,814
Kesadaran Wajib Pajak (X_4)	,446	,207	,254	2,158	,034

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistic (2022)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukan hasil uji regresi linear berganda yang menggambarkan hubungan antara variabel Pemahaman peraturan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat sebagai berikut:

$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e$

$Y = 20.419 + 0.088X_1 + 0.107X_2 + 0.031X_3 + 0.446X_4 + e$

Keterangan:

X_1 = Pemahaman Peraturan Pajak

X_2 = Tarif Pajak

X_3 = Sanksi Pajak

X_4 = Kesadaran Wajib Pajak

a = bilangan konstan

e = standar eror

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koefisien (a) = nilai konstanta dari persamaan regresi linier berganda dalam penelitian sebesar 20.419 menyatakan bahwa jikaa variabel pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak bernilai nol, maka nilai konstanta dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 20.149.
2. koefisien regresi X1 (Pemahaman Peraturan Pajak) dari perhitungan linier berganda sebesar 0.088 yang artinya apabila terdapat kenaikan satu persen pada pemahaman peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan 0.088. Jadi Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. koefisien regresi X2 (Tarif Pajak) dari perhitungan linier berganda sebesar 0.107 yang artinya apabila terdapat kenaikan satu persen pada tarif pajak, kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan 0.107. Jadi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. koefisien regresi X3 (sanksi pajak) dari perhitungan linier berganda sebesar 0.031 yang artinya apabila terdapat kenaikan satu persen pada sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan 0.031. Jadi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. koefisien regresi X4 (kesadaran wajib pajak) dari perhitungan linier berganda sebesar 0.446 yang artinya terdapat kenaikan satu persen pada kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan 0.446. Jadi kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.6.2 Uji t

Uji t bertujuan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau nilai sig < 0,05. Untuk menentukan T_{tabel} pada penelitian ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan 5% dengan jumlah responden (N) dan jumlah variabel independen atau dengan rumus (0,05/2 : n-k-1) maka diperoleh T_{tabel}

sebesar 1.994. Adapun hasil uji t penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak memiliki nilai sig > 0,05 yang artinya secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel tarif pajak memiliki nilai sig > 0,05 yang artinya secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak memiliki nilai sig > 0,05 yang artinya secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig < 0,05 yang artinya secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga disimpulkan sebagai berikut:

H1 = Pemahaman peraturan pajak memiliki T_{hitung} (0.461) < T_{tabel} (1.994) dan mempunyai nilai sig (0,646) > 0,05. Sehingga disimpulkan variabel pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H1 ditolak.

H2 = Tarif Pajak *e-commerce* memiliki T_{hitung} (0,639) < T_{tabel} (1.994) dan mempunyai nilai sig (0,525) > (0,05). Sehingga disimpulkan variabel tarif pajak *e-commerce* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya H2 ditolak.

H3 = Sanksi Pajak *e-commerce* memiliki T_{hitung} (0,236) < T_{tabel} (1.994) dan mempunyai nilai signifikan (0,814) > (0,05). Sehingga disimpulkan variabel sanksi pajak *e-commerce* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya H3 ditolak.

H4 = Kesadaran Wajib Pajak T_{hitung} (2,158) > T_{tabel} (1.994) dan mempunyai nilai signifikan (0,034) < (0,05). Sehingga disimpulkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 diterima.

5.6.3 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh yang diberikan variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	,261[a]	,068	,021	3,35596

Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), Pemahaman Peraturan Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_3), Tarif Pajak (X_2)

Sumber: Data diolah IBM SPSS Statistic (2022)

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukan R square sebesar 0,021 atau setara dengan 2,1%. Oleh karena itu dapat disimpulkan variabel pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara simultan sebesar 2,1% terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sisanya sebesar 97,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.7 Pembahasan Penelitian

Penelitian ini melibatkan 84 responden pelaku UMKM dengan *E-commerce* yang bekerja sama dengan *shopeefood* di Kecamatan Tembalang guna memberikan informasi terkait penelitian ini tentang variabel pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji validitas menunjukan bahwa seluruh angket pernyataan yang diajukan kepada 84 responden dinyatakan valid karena $R_{hitung} > R_{tabel.}$ Kemudian dari hasil uji realibilitas data penelitian ini dinyatakan reliabel karena semua pernyataan memiliki *cronbach's alpha* > 0,60.

Dalam penelitian ini R square menunjukan angka sebesar 0,021 atau setara dengan 2,1% artinya variabel pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2,1% dan sisanya 97,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Dari hasil uji regresi berganda menghasilkan persamaan regresi bahwa $Y = 20.419 + 0.088X_1 + 0.107X_2 + 0.031X_3 + 0.446X_4$ dengan

nilai konstan sebesar 20.419. kemudian dari hasil uji F menunjukan adanya pengaruh simultan antara variabel X_1, X_2, X_3, X_4 terhadap variabel Y dengan nilai signifikansi 0,227 > 0,05 dan nilai F_{hitung} (1,446) > F_{tabel} (2.49). sedangkan hasil uji t berdasarkan hipotesis pada penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk variabel pemahaman peraturan pajak (X_1) diketahui T_{hitung} (0,46) < T_{tabel} (1,994) dan nilai signifikan 0,646 > 0,05. Artinya variabel pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H_1 dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nelsi Arisandy tahun 2017 yang memiliki kesimpulan bahwasanya pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang masih kurang pemahamannya secara terperinci dan hasil dari pengamatan masih banyak wajib pajak yang belum mampu untuk mengisi SPT nya sendiri[58].

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis diawal dan bertolak belakang dengan teori yang telah dipaparkan, yaitu semakin paham wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman wajib pajak merupakan masalah internal yang dapat mempengaruhi tanggapan wajib pajak itu sendiri dalam membuat keputusan terkait kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Akan tetapi Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce* pada pelaku UMKM *shopeefood* di kecamatan Tembalang. Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil jawaban responden yaitu menunjukan bahwa dominan wajib pajak memiliki pemahaman peraturan pajak yang memadai akan tetapi terdapat sebagian dari wajib pajak kurang mengetahui tentang batas waktu pelaporan SPT nya sehingga

[58] Nelsi Arisandy, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2017): 62–71.

hal tersebut membuktikan bahwa pemahaman yang responden miliki masih sebatas pengetahuan dan belum ada implementasinya secara penuh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajaknya. Sebagaimana hasil analisis jawaban responden diketahui hasil jawaban dari responden dengan jawaban Setuju dan Sangat setuju memiliki persentase dominan yaitu lebih dari 0,70 dari jawaban lainnya sehingga menunjukan wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai, akan tetapi sebagian dari wajib pajak UMKM ada yang masih belum mengetahui mengenai batas pelaporan SPT sebesar 0,30 ditarik kesimpulan bahwa sebagian dari wajib pajak UMKM ada yang belum mengetahui batas waktu pelaporan sptnya. Sehingga hal tersebut membuat variabel pemahaman peraturan pajak dikecamatan Tembalang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Pengaruh Tarif Pajak *E-commerce* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk variabel tarif pajak *e-commerce* (X_2) memiliki T_{hitung} (0,639) < T_{tabel} (1,994) dengan nilai signifikan 0,525 > 0,05. Artinya variabel tarif pajak *e-commerce* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H_2 dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Khodijah DKK pada tahun 2021 dan penelitian Rifa Arbangatin Khasanah tahun 2016 yang menghasilkan kesimpulan bahwa tarif pajak *e-commerce* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan bertolak belakang dengan penelitian Khaerun Nadhor DKK pada tahun 2020 yang memiliki kesimpulan bahwasanya penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena persepsi wajib pajak ketika tarif pajak semakin rendah maka semakin sedikit pula pajak yang dibayarkan sehingga dapat menguntungkan usahanya[59].

Secara teori, penurunan tarif pajak *e-commerce* merupakan salah satu masalah eksternal yang bersumber dari Pemerintah. Sehingga ketika pemerintah memiliki upaya untuk menurunkan tarif pajak yaitu sesuai

[59] Khaerun Nadhor et al., "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat)," *El Muhasaba Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2020): 88.

dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi tarif pajak final sebesar 0,5%, tentunya hal tersebut akan mendorong pelaku UMKM lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya dan dengan adanya bantuan dari pemerintah pada masa pandemi covid-19 dengan harapan pelaku umkm dapat bertahan, berkembang, dan bertumbuh ditengah tantangan pandemi, salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan permodalan bagi masing-masing UMKM sebesar 1,2 juta[60]. Hal tersebut membuktikan adanya dorongan pemerintah agar wajib pajak pelaku UMKM dapat membantu memulihkan perekonomian dengan cara patuh dan taat dalam membayar pajak.

Namun hasil dari penelitian ini tergolong unik, karena ketika tarif pajak diturunkan dan wajib pajak sudah mendapatkan dorongan berupa bantuan untuk pemulihan UMKM, kepatuhan wajib pajak dikecamatan Tembalang masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan adanya tarif pajak baru sehingga wajib pajak UMKM mengalami kesulitan bagaimana cara perhitungannya. Sebagaimana hasil analisis jawaban responden pada pernyataan ke-6 yaitu wajib pajak mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak atas PPh final, diketahui persentase jawaban responden yaitu S dan SS sebesar 0,86 sedangkan KS sebesar 0.14. hal tersebut menunjukan bahwasanya wajib pajak UMKM masih mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak atas tarif pajak final. Jadi hasil dari pengamatan peneliti, bahwa antara bantuan yang telah disalurkan dengan omset yang UMKM hasilkan tidak sebanding dan wajib pajak UMKM masih mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak atas tarif pajak final. Sehingga hal tersebut membuat variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan transaksi *e-commerce* di kecamatan Tembalang.

[60] Kemenkeu, "Pemerintah Terus Perkuat Umkm Melalui Berbagai Bentuk Bantuan," *Kemenkeu.Go.Id*.

4.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak *e-commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sanksi pajak *e-commerce* (X_3) memiliki T_{hitung} 0,236 < T_{tabel} 1,994 dan nilai signifikan 0,814 > 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa sanksi pajak *e-commerce* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya, H_3 dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Risa Permata Dwi Cahaya Ningtyas pada tahun 2012 yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajip pajak, hal tersebut dikarenakan kurang tepatnya pengenaan sanski terhadap pelanggaran wajib pajak dan fiskus masih kurang tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran[61]. Dan penelitian dari Affeni Maxuel dan Anita Primastiwi tahun 2021 yang menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce,* karena sanksi pajak ringan akan meningkatkan kepatuhan sedangkan sanksi pajak berat akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan pandangan yang buruk terhadap dampak yang akan ditimbulkan sehingga wajib pajak memikirkan rendahnya resiko yang akan didapatkan ketika terlambat menyetor, melapor dan membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari fiskus[62].

Secara teori, sanksi pajak juga merupakan masalah eksternal yang berasal dari ketetapan pemerintah sesuai dengan perundang-undangan. Dengan adanya sanksi pajak yang ditetapkan bertujuan untuk dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak UMKM *e-commerce* dalam kepatuhan membayar kewajiban pajaknya. Sedangkan, hasil dari penelitian ini sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM *e-commerce* pada *Shopeefood* di Kecamatan Tembalang. Hal tersebut

---

[61] Risa Permata Dwi Cahaya Ningtyas, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Serta Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Malang," *Skripsi Universitas Brawijaya* (2012): 117.

[62] Anita Primastiwi Afeni Maxuel, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce," *JRMB* 16 No. 1 (2021): 27.

disebabkan adanya pandangan wajib pajak UMKM *e-commerce* mengenai sanksi pajak yang memberatkan, sebagaimana hasil analisis dari jawaban responden dapat diketahui persentase wajib pajak UMKM *e-commerce* terhadap sanksi adm berupa denda 50% dari pajak yang kurang bayar dan pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar, yaitu jawaban S dan SS sebesar 0,57 sedangkan sisanya sebesar 0,43 wajib pajak dikatakan kurang setuju dengan pernyataan sanksi adm denda 50%. Sehingga hasil dari pengamatan peneliti wajib pajak UMKM *e-commerce* di kecamatan Tembalang dengan adanya sanksi adm denda 50% memiliki pandangan bahwasanya sanksi tersebut merupakan resiko tinggi yang memberatkan. Sehingga variabel sanksi pajak tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* di kecamatan Tembalang.

4.3.4 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel kesadaran wajib pajak (X_4) diketahui memiliki T_{hitung} 2,158 > T_{tabel} 1,994 dan nilai signifikan 0,034 < 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya H_4 pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ristra Putri pada tahun 2017 yang menghasilkan kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hasil ini didukung juga dengan penelitian Putri Dwi Indriyani pada tahun 2020 bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori Atribusi, yaitu kesadaran wajib pajak merupakan suatu masalah yang berdasarkan dari faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi dari wajib pajak guna mengambil keputusan mengenai kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian ini memberikan bukti bahwa teori atribusi dapat menjelaskan sikap pelaku UMKM dengan transaksi *e-commerce* yang bekerjasama dengan *shopeefood* di kecamatan Tembalang berdasarkan faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak, dan teori ini

mendukung bahwa kesadaran pelaku UMKM dalam kewajiban pajaknya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran yang dimiliki wajib pajak UMKM dengan transaksi *e-commere* yang bekerjasama dengan *shopeefood* di kecamatan Tembalang akan mempengaruhi mereka dalam berperilaku patuh atau tidak patuh setelah mereka mengetahui hasil yang akan didapat ketika memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan membayar kewajiban pajak yang sangat penting untuk membantu pembangunan negara. Artinya dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak UMKM dengan transaksi *e-commerce shopeefood* di kecamatan Tembalang akan meningkatkan kepatuhanan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukan variabel pemahaman peraturan pajak *e-commerce* memiliki T_{hitung} (0,46) < T_{tabel} (1,994) dan nilai signifikan 0,646 > 0,05. Artinya variabel pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sebagian dari wajib pajak UMKM *shopeefood* di Kecamatan Tembalang ada yang belum mengetahui mengenai batas pelaporan SPT. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori Atribusi.
2. Hasil analisis menunjukan variabel tarif pajak *e-commerce* memiliki T_{hitung} (0,639) < T_{tabel} (1,994) dengan nilai signifikan 0,525 > 0,05. Artinya variabel tarif pajak *e-commerce* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM *shopeefood* di kecamatan Tembalang masih mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak atas tarif pajak final. Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori Atribusi.
3. Hasil analisis menunjukan variabel sanksi pajak *e-commerce* memiliki T_{hitung} 0,236 < T_{tabel} 1,994 dengan nilai signifikan 0,814 > 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa sanksi *paajak e-commerce* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pandangan wajib pajak UMKM *Shopeefood* di Kecamatan Tembalang mengenai sanksi adm denda 50% merupakan risiko tinggi yang memberatkan. Jadi, hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori Atribusi.
4. Hasil analisis variabel kesadaran wajib pajak memiliki T_{hitung} 2,158 > T_{tabel} 1,994 dengan nilai signifikan 0,034 < 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingginya kesadaran pelaku UMKM yang

bekerjasama dengan *shopeefood* di kecamatan Tembalang dalam membayar kewajiban pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori Atribusi.

5.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mencari variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh tingkat signifikansi yang lebih besar terhadap variabel dependen serta dapat memperluas objek penelitian dengan menambah objek lebih dari satu kecamatan atau bahkan satu kota agar diperoleh hasil penelitian yang lebih relevan.
2. Bagi pemilik UMKM diharapkan untuk lebih meng-update pengetahuan mengenai peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi pemerintah, untuk terus mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan pemahaman wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat mengetahui batas pelaporan SPT dan dapat mengisi SPT dengan benar.
4. Bagi PT Shopee, untuk memberi persenan lebih banyak dari bagi hasil antara keduanya agar UMKM merasa tidak terbebani.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini hanya memilki pengaruh signifikan sebesar 2,1% terhadap variabel dependen.
2. Objek dalam penelitian ini hanya mencakup satu kecamatan saja yang ada di kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Afeni Maxuel, Anita Primastiwi. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce." *JRMB* 16 No. 1 (2021): 27.

Arisandy, Nelsi. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2017): 62–71.

Asep Hermawan, Husna Leila Yusran. *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Desindo Putra Mandiri, 2017.

Asep Saepul Hamdi, E. Bahrudin. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Basyaroh, Elisa Martha Hanum. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sanksi Perpajakan, Dan Reliugitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Samarang." *Skripsi UIN Walisongo* (2021): 01.

Caroline, Cintya. "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Skripsi Universitas Multimedia Nusantara*, (2021): 08.

Daryanto, Wiwiek Mardawiyah, Putri Tresna Meiliawati, and Tesha Syarafina. "The Financial Impact Of Conventional Retail Industry Due To Online Based Shoping Model In Indonesia (Case Study Of PT Matahari Top 10 Rising E-Commerce Countries." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 21, no. 2 (2020): 26–37.

Dharma, Budi. *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Realibilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Guepedia, n.d.

Dolasais, Jordan. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce." *Skripsi, Institut Bisnis dan Informatika KWIK KIAN GIE* (2020): 21–22.

Fitriyani, Janatin. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Reliugisitas Terhadap Kepatuhan Wajib (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal).” *Skripsi: UIN Walisongo* (2019): 15.

Handayi, Alia Engka Nadita Putri, Tati. “Keputusan Pembelian E-Commerce Shopee Pada Generasi Milenial Di Kecamatan Johar Baru.” *JSMB* Vol.8(2) (2021): 37.

Haniah, Nisrina. “Uji Normalitas Dengan Metode Liliefors.” *Statistika Pendidikan*, no. 1 (2013): 1–17.

Hasanah, Rifa Arbangatin. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shoping).” *Skripsi UIN Maulana Malik Raden Ibrahim* (2016): 20.

Hayati, Rina. “Pengertian Metode Pengumpulan Data, Jenis, Cara Menulis Dan Contohnya.”

Hidayat, Stefani Yurike. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shop).” *Skripsi, Universitas Katolik Darma Cendika* (2019): 29.

Indriyani, Putri dwi. “Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku e-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan” (2020): 1–143.

Jakarta, Bisnis. “Siapa Yang Jadi E-Commerce No. 1 Indonesia Tahun Ini?” *31 Oktober*. Last modified 2021. Accessed January 12, 2022. https://www.bisnisjakarta.co.id/2021/10/31/siapa-yang-jadi-e-commerce-no-1-indonesia-tahun-ini/#:~:text=Data-data di atas menunjukkan,commerce yang paling mereka percaya.

Jayani, Dwi Hadya. “Penetrasi Internet Indonesia Meningkat Saat Pandemi Covid-19.”

Kemenkeu. “Pemerintah Terus Perkuat Umkm Melalui Berbagai Bentuk Bantuan.” *Kemenkeu.Go.Id*.

Khomariyah, Anisa'ul. "Peluang Bisnis Makanan Dan Minuman Di Shopee Food Bagi UMKM" (2021): 1–10.

Liminata, Susana. "Analisis Peraturan Pajak E-Commerce, Tarif Pajak E-Commerce, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Dengan Sistem E-Commerce." *Skripsi STIE* (2019): 02.

Meiryani. "Memahami Uji F (Uji Simultan) Dalam Regresi Linier." *Binus University*.

Muilawati, Nela Agustina. "Kompleksitas Pajak: Tax Ratio, Perekonomian, Dan Kesadaran Pajak." Last modified 2021. Accessed February 24, 2022. https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/kompleksitas-pajak-tax-ratio-perekonomian-dan-kesadaran-pajak.

Nadhor, Khaerun, Nur Fatoni, Nurudin Nurudin, and Faris Shalahuddin Zakiy. "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat)." *El Muhasaba Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2020): 88.

Nikmah, Ulin. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kudus." *Skripsi UIN Walisongo* (2020): 01.

Ningtyas, Risa Permata Dwi Cahaya. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Serta Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Malang." *Skripsi Universitas Brawijaya* (2012): 117.

Nur, Muhammad, Reza Mustagfaran, and (Universitas Nasional). "Analisis Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Subjek Dan Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Tebet." *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 40, no. 1 (2016): 5601–5635.

Oktaviani, Rachmawati Meita, and Sheila Adellina. "Kepatuhan Wajib Pajak Ukm." *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, ISSN: 2302-8556* 5, no. 2 (2016): 136–145.

Putriani, Halimah. "Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Pemahaman Dan Self Assesment System Pajak E-Commerce Terhadap Kepatuhan Pelaku Bisnis E-Commerce Dalam Membayar Pajak Di Shopee." *IAIN Tulungagung*

(2021): 24–25.

Rahayu, Hastanti Agustin, and Hanafi Adi Putranto. “Pajak E-Commerce Di Indonesia.” *Publikasi Ilmiah UMS* (2019): 871–881. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11420.

Ricki Yuliardi, Zuli N. *Statistika Penelitian Plus Totarial SPSS*. Yogyakarta: Innosain, 2017.

Saefullah. “Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Terhadap Karakter Anak.” *30 November*. Last modified 2020. Accessed January 11, 2022. https;//bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak.

Samsuar. “Atribusi.” *Jurnal Network Media* Vol: 2 No. (2019): 66.

Saputra, Bayu Aji. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Keikhlasan Wajib Pajak, Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kudus).” *Skripsi: UIN Walisongo* (2021): 10–11.

Setiawan, Kadek Juniati Putri1 Putu Ery. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur” 18 (2017): 1112–1140.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Turmudi, Muhammad. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-‘Adl* 8, no. 1 (2015): 136–137.

Waluyo. *Perubahan Perundang-Undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Yana, Shintiya Betra. “Pengaruh Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi E-Commerce Di Shopee Pada Distributor Masker Jakarta Timur.” *skripsi STIEI* (2021): 01.

Yulianti, Farida. “Jenis Dan Fungsi Pajak.” *2020*, 2020.

"Daftar Umkm Kota Semarang." *07 Maret*. Last modified 2022. Accessed March 11, 2022. https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/.

Q.S Al Ashr: 3, n.d.

Q.S Al Maidah: 1, n.d.

Q.S At Taubah : 41, n.d.

"UU HPP Dapat Naikkan Penerimaan Negara Dan Tax Ratio." *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. Last modified 2021. Accessed February 24, 2022. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-uu-hpp-dapat-naikkan-penerimaan-negara-dan-tax-ratio/.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KUISIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i

Di Tempat

Perihal: Permohonan Mengisi Kuesioner Penelitian

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Transaksi *E-commerce* Pelaku UMKM ShopeeFood" guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Identitas peneliti:

Nama : Siti Lu'lu'uz Zakiyah

NIM : 1805046116

Program Studi : Akuntansi Syariah

Alamat : Dusun Ketangi Rt 04/ Rw 05, Desa Ketangirejo, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

Dengan ini, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan menjawab pernyataan-pernyataan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan hanya untuk kepentingan akademik dan akan dirahasiakan.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/I yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Kuisioner ini.

Semarang, Februari 2022

Peneliti

Siti Lu'lu'uz Zakiyah

NIM.1805046116

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

1. Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Beri tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

   Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut:

   STS : Sangat Tidak Setuju
   TS : Tidak Setuju
   KS : Kurang Setuju
   S : Setuju
   SS : Sangat Setuju

DATA RESPONDEN

Sebelum mengisi kuisioner, dimohon untuk memberikan data-data yang ada dibawah ini dengan sebenar-benarnya:

Nama :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Apakah memiliki NPWP :

Alamat Usaha :

A. Kepatuhan Wajib Pajak

NO	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayan Pajak).					
2.	Saya tidak pernah mengalami masalah setiap mengisi formulir pajak.					
3.	Wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu.					
4.	Wajib pajak selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
5.	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.					
6.	Aparatur pajak telah memungut pajak sesuai dengan peraturan					

	perundang- undangan yang berlaku.					
7.	Wajib pajak selalu menggisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.					
8.	Wajib pajak menyampaikan SPT ke Kanor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					
9.	Wajib pajak selalu melakukan pembukuan atau pencatatan.					

B. Pemahaman Peraturan Pajak

NO	**Item Pernyataan**	**Alternatif Jawaban**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
		STS	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.					
2.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.					
3.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.					
4.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung,					

	memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).					
5.	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya.					
6.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.					

C. Penurunan Tarif Pajak

NO	**Item Pernyataan**	**Alternatif Jawaban**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
		STS	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
1.	Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang.					
2.	Penurunan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang.					
3.	Tarif pajak saat ini lebih baik dari pada tarif pajak sebelumnya.					
4.	Perubahan tarif pajak saat ini menurunkan jumlah pajak terutang.					
5.	Penetapan tarif pajak tanpa melihat penghasilan untung atau rugi dapat merugikan wajib pajak.					
6.	Saya mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak atas					

	penghasilan karena adanya tarif pajak baru sebesar 0,5%.					
7.	Saya merasa prosedur perpajakan menjadi lebih mudah sejak adanya PP No.23 Tahun 2018.					

D. Sanksi Pajak

NO	**Item Pernyataan**	**Alternatif Jawaban**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
		STS	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
1.	Sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan.					
2.	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang bayar, apabila pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan tidak benar.					
3.	Denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan orang pribadi Rp 100.000,00.					
4.	Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
5.	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat.					

E. Kesadaran Wajib Pajak

NO	Item Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya membayar pajak karena kesadaran sendiri.					
2.	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dan melaporkan SPT.					
3.	Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara terutama yang sudah memiliki NPWP.					
4.	Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Negara.					
5.	Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu.					

DOKUMENTASI PENGISIAN KUISIONER














ANG KEJU


AJINE
EKA JAJANAN DAN ES

JAWABAN RESPONDEN

NO	Pemahaman Peraturan Pajak X1						
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	total
1	4	3	5	3	4	5	24
2	4	3	4	4	4	5	24
3	2	2	4	4	5	5	22
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	3	4	4	4	5	24
6	4	5	5	4	5	5	28
7	4	3	4	3	5	5	24
8	4	4	4	4	5	5	26
9	4	4	4	4	5	5	26
10	3	3	4	4	4	4	22
11	4	4	5	4	4	5	26
12	4	4	4	3	4	4	23
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	3	4	3	4	4	22
15	4	3	4	4	4	5	24
16	4	4	5	4	5	4	26
17	3	3	4	4	4	4	22

18	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**22**
19	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**22**
20	**4**	**4**	**5**	**4**	**5**	**5**	**27**
21	**3**	**3**	**5**	**3**	**4**	**5**	**23**
22	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**
23	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**24**
24	**4**	**4**	**5**	**4**	**5**	**5**	**27**
25	**4**	**4**	**5**	**3**	**4**	**5**	**25**
26	**2**	**3**	**4**	**3**	**4**	**5**	**21**
27	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**	**4**	**21**
28	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**27**
29	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**	**5**	**22**
30	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**5**	**27**
31	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**26**
32	**4**	**3**	**5**	**3**	**5**	**5**	**25**
33	**4**	**3**	**5**	**4**	**4**	**5**	**25**
34	**2**	**2**	**4**	**3**	**4**	**5**	**20**
35	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**
36	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**5**	**24**
37	**4**	**5**	**5**	**4**	**5**	**5**	**28**

38	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**26**
39	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**
40	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**
41	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**26**
42	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**	**4**	**21**
43	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**	**5**	**22**
44	**4**	**4**	**5**	**4**	**5**	**5**	**27**
45	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**26**
46	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**25**
47	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**
48	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**
49	**3**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**25**
50	**3**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**24**
51	**3**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**24**
52	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**26**
53	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**	**4**	**21**
54	**4**	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**26**
55	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**25**
56	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**25**
57	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**25**

58	**3**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**22**
59	**3**	**4**	**4**	**3**	**4**	**5**	**23**
60	**3**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**22**
61	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**26**
62	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**	**4**	**21**
63	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**25**
64	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**
65	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**
66	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**
67	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**26**
68	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**26**
69	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**25**
70	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**23**
71	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**30**
72	**4**	**3**	**5**	**4**	**4**	**4**	**24**
73	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**27**
74	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**22**
75	**3**	**3**	**5**	**3**	**4**	**5**	**23**
76	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**
77	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**29**

78	**4**	**3**	**5**	**5**	**4**	**4**	**25**
79	**4**	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**26**
80	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**22**
81	**3**	**3**	**5**	**3**	**4**	**4**	**22**
82	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**25**
83	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**
84	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**24**

NO	**TARIF PAJAK X2**							
	X2.1	**X2.2**	**X2.3**	**X2.4**	**X2.5**	**X2.6**	**X2.7**	**TOTAL**
1	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**31**
2	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**28**
3	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**26**
4	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**31**
5	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**30**
6	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**28**
7	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**26**
8	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**3**	**3**	**25**
9	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**26**
10	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**30**

11	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**30**
12	**5**	**5**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**31**
13	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**27**
14	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**3**	**3**	**25**
15	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**31**
16	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**30**
17	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**31**
18	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**29**
19	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**27**
20	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**32**
21	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**29**
22	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**31**
23	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**31**
24	**5**	**5**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**32**
25	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**25**
26	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**25**
27	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**31**
28	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**28**
29	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**25**
30	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**31**

31	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**29**
32	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**30**
33	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**28**
34	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**30**
35	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**27**
36	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**30**
37	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**3**	**4**	**26**
38	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**28**
39	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**30**
40	**5**	**5**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**31**
41	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**5**	**5**	**32**
42	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**29**
43	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**30**
44	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**27**
45	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**30**
46	**5**	**5**	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**32**
47	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**30**
48	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**31**
49	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**30**
50	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**29**

51	**5**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**31**
52	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**27**
53	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**30**
54	**5**	**5**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**32**
55	**5**	**5**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**31**
56	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**27**
57	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**27**
58	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**29**
59	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**30**
60	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**5**	**5**	**32**
61	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**31**
62	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**33**
63	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**27**
64	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**29**
65	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**32**
66	**5**	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**32**
67	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**29**
68	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**27**
69	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**27**
70	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**30**

71	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**25**
72	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**26**
73	**4**	**4**	**3**	**4**	**3**	**4**	**3**	**25**
74	**4**	**4**	**3**	**4**	**3**	**4**	**4**	**26**
75	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**31**
76	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**28**
77	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**25**
78	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**26**
79	**4**	**4**	**3**	**4**	**3**	**4**	**3**	**25**
80	**4**	**4**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**25**
81	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**31**
82	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**29**
83	**4**	**4**	**3**	**4**	**3**	**4**	**4**	**26**
84	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**31**

NO	**Sanksi Pajak X3**					
	X3.1	**X3.2**	**X3.3**	**X3.4**	**X3.5**	**total**
1	**4**	**3**	**4**	**4**	**3**	**18**
2	**2**	**1**	**1**	**4**	**2**	**10**

3	**4**	**4**	**3**	**4**	**3**	**18**
4	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
5	**2**	**1**	**1**	**4**	**2**	**10**
6	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**23**
7	**3**	**3**	**1**	**4**	**4**	**15**
8	**5**	**3**	**5**	**5**	**5**	**23**
9	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**22**
10	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**18**
11	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**21**
12	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**21**
13	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**22**
14	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**22**
15	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**22**
16	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**18**
17	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**21**
18	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**21**
19	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**23**
20	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
21	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
22	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**22**

23	**3**	**2**	**3**	**4**	**3**	**15**
24	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**21**
25	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**22**
26	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**19**
27	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
28	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**21**
29	**3**	**4**	**3**	**3**	**3**	**16**
30	**3**	**2**	**2**	**3**	**4**	**14**
31	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**19**
32	**4**	**2**	**3**	**4**	**3**	**16**
33	**2**	**1**	**1**	**4**	**3**	**11**
34	**4**	**4**	**3**	**4**	**3**	**18**
35	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
36	**3**	**2**	**2**	**4**	**3**	**14**
37	**5**	**3**	**4**	**5**	**4**	**21**
38	**3**	**2**	**3**	**4**	**4**	**16**
39	**5**	**3**	**5**	**5**	**5**	**23**
40	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**22**
41	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**18**
42	**4**	**3**	**3**	**4**	**5**	**19**

43	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**19**
44	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**19**
45	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**16**
46	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
47	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
48	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**21**
49	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**21**
50	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
51	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
52	**4**	**3**	**4**	**4**	**3**	**18**
53	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**19**
54	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**17**
55	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**18**
56	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**18**
57	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
58	**4**	**3**	**4**	**5**	**4**	**20**
59	**4**	**3**	**4**	**5**	**5**	**21**
60	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
61	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
62	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**

63	**4**	**3**	**3**	**4**	**5**	**19**
64	**4**	**3**	**4**	**5**	**4**	**20**
65	**3**	**3**	**3**	**4**	**3**	**16**
66	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**18**
67	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**18**
68	**4**	**3**	**3**	**5**	**4**	**19**
69	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
70	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
71	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**25**
72	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**18**
73	**4**	**5**	**1**	**4**	**5**	**19**
74	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
75	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**	**24**
76	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
77	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
78	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**25**
79	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**18**
80	**4**	**5**	**3**	**4**	**5**	**21**
81	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
82	**5**	**4**	**5**	**4**	**5**	**23**

83	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**21**
84	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**

NO	**Kesadaran Wajib Pajak X4**					
	X4.1	**X4.2**	**X4.3**	**X4.4**	**X4.5**	**total**
1	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
2	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
3	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
4	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
5	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
6	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**25**
7	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
8	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**21**
9	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**21**
10	**4**	**3**	**4**	**5**	**3**	**19**
11	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
12	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
13	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
14	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
15	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**23**

16	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**18**
17	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**21**
18	**4**	**5**	**5**	**4**	**5**	**23**
19	**5**	**4**	**5**	**4**	**5**	**23**
20	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**21**
21	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**23**
22	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**23**
23	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**23**
24	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**19**
25	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**18**
26	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**18**
27	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
28	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**22**
29	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**23**
30	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**21**
31	**4**	**3**	**4**	**4**	**3**	**18**
32	**4**	**4**	**4**	**5**	**3**	**20**
33	**3**	**3**	**4**	**5**	**4**	**19**
34	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
35	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**

36	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
37	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**25**
38	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
39	**4**	**3**	**5**	**4**	**4**	**20**
40	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**21**
41	**4**	**3**	**4**	**5**	**3**	**19**
42	**2**	**3**	**4**	**5**	**3**	**17**
43	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**19**
44	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**17**
45	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**18**
46	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
47	**3**	**4**	**4**	**5**	**4**	**20**
48	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
49	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
50	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
51	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
52	**4**	**3**	**4**	**5**	**4**	**20**
53	**4**	**3**	**4**	**5**	**3**	**19**
54	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**18**
55	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**18**

56	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
57	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
58	**4**	**4**	**4**	**5**	**3**	**20**
59	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**23**
60	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**22**
61	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**21**
62	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**21**
63	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**21**
64	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**19**
65	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**19**
66	**3**	**3**	**4**	**5**	**3**	**18**
67	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
68	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
69	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**17**
70	**3**	**3**	**4**	**5**	**3**	**18**
71	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**25**
72	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**23**
73	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**25**
74	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**19**
75	**3**	**3**	**4**	**5**	**4**	**19**

76	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
77	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**22**
78	**5**	**4**	**5**	**5**	**5**	**24**
79	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**23**
80	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**25**
81	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**21**
82	**3**	**3**	**4**	**5**	**5**	**20**
83	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
84	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**22**

NO	**Kepatuhan Wajib Pajak Y**									
	Y.1	**Y.2**	**Y.3**	**Y.4**	**Y.5**	**Y.6**	**Y.7**	**Y.8**	**Y.9**	**total**
1	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**3**	**2**	**29**
2	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**5**	**36**
3	**4**	**4**	**1**	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**31**
4	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**5**	**5**	**5**	**42**
5	**4**	**2**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**1**	**1**	**27**
6	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**37**
7	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**3**	**4**	**3**	**35**
8	**4**	**2**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**1**	**3**	**29**

9	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**39**
10	**5**	**3**	**3**	**3**	**4**	**5**	**4**	**4**	**3**	**34**
11	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**38**
12	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**38**
13	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4**	**3**	**36**
14	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**36**
15	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**35**
16	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**37**
17	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**37**
18	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**38**
19	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**32**
20	**5**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**36**
21	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**40**
22	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**39**
23	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**39**
24	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**38**
25	**5**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**32**
26	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**35**
27	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**34**
28	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**37**

29	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**39**
30	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**41**
31	**3**	**3**	**2**	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**29**
32	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**4**	**2**	**31**
33	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**5**	**36**
34	**4**	**4**	**1**	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**31**
35	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**5**	**5**	**5**	**42**
36	**4**	**2**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**1**	**30**
37	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**37**
38	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**3**	**4**	**3**	**35**
39	**4**	**2**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**1**	**3**	**29**
40	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**39**
41	**5**	**3**	**3**	**3**	**4**	**5**	**4**	**4**	**3**	**34**
42	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**38**
43	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**1**	**35**
44	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4**	**3**	**36**
45	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**30**
46	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**3**	**37**
47	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**37**
48	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**	**4**	**40**

49	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**3**	**37**
50	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**2**	**30**
51	**4**	**3**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**3**	**35**
52	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**3**	**38**
53	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**40**
54	**4**	**3**	**3**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**36**
55	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**39**
56	**3**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**32**
57	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**37**
58	**4**	**5**	**3**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**37**
59	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	**3**	**38**
60	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**35**
61	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**35**
62	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**36**
63	**4**	**5**	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**3**	**39**
64	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**35**
65	**4**	**4**	**1**	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**31**
66	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**2**	**36**
67	**4**	**3**	**4**	**5**	**4**	**4**	**3**	**4**	**3**	**34**
68	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**36**

69	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**4**	**3**	**32**
70	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**31**
71	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**33**
72	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**36**
73	**5**	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**42**
74	**2**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**34**
75	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**31**
76	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**36**
77	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**34**
78	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**35**
79	**5**	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**41**
80	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**35**
81	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**3**	**3**	**4**	**31**
82	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**36**
83	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**36**
84	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**38**

OUTPUT SPSS

HASIL UJI SPSS ATAS JAWABAN RESPONDEN TERHADAP PERNYATAAN KUISIONER

HASIL UJI ANALISIS DESKRIPTIF

A. Pemahaman Peraturan Pajak

Descriptive Statistics

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1.1	84	3	2	5	309	3,68	,584	,341
X1.2	84	3	2	5	309	3,68	,604	,365
X1.3	84	1	4	5	364	4,33	,474	,225
X1.4	84	2	3	5	322	3,83	,534	,285
X1.5	84	1	4	5	359	4,27	,449	,201
X1.6	84	1	4	5	380	4,52	,502	,252
Valid N (listwise)	84							

B. Tarif Pajak

Descriptive Statistics

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X2.1	84	1	4	5	368	4,38	,489	,239
X2.2	84	1	4	5	365	4,35	,478	,229
X2.3	84	2	3	5	331	3,94	,567	,322
X2.4	84	2	3	5	356	4,24	,551	,304
X2.5	84	2	3	5	324	3,86	,443	,196
X2.6	84	2	3	5	332	3,95	,489	,239
X2.7	84	2	3	5	347	4,13	,555	,308

Valid N (listwise)	84							

C. Sanksi Pajak

Descriptive Statistics

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X3.1	84	3	2	5	335	3,99	,668	,446
X3.2	84	4	1	5	294	3,50	,843	,711
X3.3	84	4	1	5	308	3,67	,974	,948
X3.4	84	2	3	5	356	4,24	,481	,232
X3.5	84	3	2	5	341	4,06	,683	,466
Valid N (listwise)	84							

D. Kesadaran Wajib Pajak

Descriptive Statistics

	N	Range	Min	Maxi	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X4.1	84	3	2	5	333	3,96	,648	,420
X4.2	84	2	3	5	332	3,95	,579	,335
X4.3	84	1	4	5	358	4,26	,442	,196
X4.4	84	1	4	5	381	4,54	,502	,252
X4.5	84	2	3	5	331	3,94	,608	,370
Valid N (listwise)	84							

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Descriptive Statistics

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Y.1	84	3	2	5	353	4,20	,597	,356
Y.2	84	3	2	5	318	3,79	,582	,339
Y.3	84	4	1	5	306	3,64	,722	,522
Y.4	84	3	2	5	338	4,02	,728	,530
Y.5	84	2	3	5	358	4,26	,540	,292
Y.6	84	2	3	5	355	4,23	,475	,225
Y.7	84	2	3	5	329	3,92	,520	,270
Y.8	84	4	1	5	320	3,81	,752	,566
Y.9	84	4	1	5	302	3,60	,852	,726
Valid N (listwise)	84							

HASIL UJI VALIDITAS

A. Pemahaman Peraturan Pajak

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	,625**	,304**	,521**	,248*	,088	,779**
	Sig. (2-tailed)		<,001	,005	<,001	,023	,426	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84
X1.2	Pearson Correlation	,625**	1	,210	,467**	,329**	,006	,743**
	Sig. (2-tailed)	<,001		,055	<,001	,002	,959	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84
X1.3	Pearson Correlation	,304**	,210	1	,174	,245*	,169	,540**
	Sig. (2-tailed)	,005	,055		,112	,024	,125	<,001

	N	84	84	84	84	84	84	84
X1.4	Pearson Correlation	,521**	,467**	,174	1	,293**	-,030	,668**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	,112		,007	,787	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84
X1.5	Pearson Correlation	,248*	,329**	,245*	,293**	1	,265*	,606**
	Sig. (2-tailed)	,023	,002	,024	,007		,015	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84
X1.6	Pearson Correlation	,088	,006	,169	-,030	,265*	1	,374**
	Sig. (2-tailed)	,426	,959	,125	,787	,015		<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84
TOTAL	Pearson Correlation	,779**	,743**	,540**	,668**	,606**	,374**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	84	84	84	84	84	84	84

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Tarif pajak

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	total
X2.1	Pearson Correlation	1	,307**	,300**	,464**	,329**	,480**	,422**	,722**
	Sig. (2-tailed)		,005	,006	<,001	,002	<,001	<,001	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84
X2.2	Pearson Correlation	,307**	1	,254*	,278*	,226*	,236*	,292**	,559**
	Sig. (2-tailed)	,005		,020	,010	,039	,031	,007	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84

X2.3	Pearson Correlation	,300**	,254*	1	,393**	,251*	,408**	,349**	,670**
	Sig. (2-tailed)	,006	,020		<,001	,022	<,001	,001	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84
Z2.4	Pearson Correlation	,464**	,278*	,393**	1	,266*	,291**	,486**	,707**
	Sig. (2-tailed)	<,001	,010	<,001		,014	,007	<,001	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84
X2.5	Pearson Correlation	,329**	,226*	,251*	,266*	1	,290**	,302**	,578**
	Sig. (2-tailed)	,002	,039	,022	,014		,007	,005	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84
X2.6	Pearson Correlation	,480**	,236*	,408**	,291**	,290**	1	,175	,652**
	Sig. (2-tailed)	<,001	,031	<,001	,007	,007		,111	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84
X2.7	Pearson Correlation	,422**	,292**	,349**	,486**	,302**	,175	1	,646**
	Sig. (2-tailed)	<,001	,007	,001	<,001	,005	,111		<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84
total	Pearson Correlation	,722**	,559**	,670**	,707**	,578**	,652**	,646**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	84	84	84	84	84	84	84	84

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. Sanksi Pajak

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	,653**	,698**	,346**	,662**	,875**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	,001	<,001	<,001
	N	84	84	84	84	84	84
X3.2	Pearson Correlation	,653**	1	,602**	,208	,575**	,820**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	,058	<,001	<,001
	N	84	84	84	84	84	84
X3.3	Pearson Correlation	,698**	,602**	1	,403**	,483**	,859**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	84	84	84	84	84	84
X3.4	Pearson Correlation	,346**	,208	,403**	1	,250*	,504**
	Sig. (2-tailed)	,001	,058	<,001		,022	<,001
	N	84	84	84	84	84	84
X3.5	Pearson Correlation	,662**	,575**	,483**	,250*	1	,765**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	,022		<,001
	N	84	84	84	84	84	84
TOTAL	Pearson Correlation	,875**	,820**	,859**	,504**	,765**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	84	84	84	84	84	84

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

D. Kesadaran Wajib Pajak

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	TOTAL
X4.1	Pearson Correlation	1	,541**	,495**	,097	,514**	,799**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	,382	<,001	<,001
	N	84	84	84	84	84	84
X4.2	Pearson Correlation	,541**	1	,426**	-,036	,471**	,719**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	,748	<,001	<,001
	N	84	84	84	84	84	84
X4.3	Pearson Correlation	,495**	,426**	1	,120	,507**	,714**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		,276	<,001	<,001
	N	84	84	84	84	84	84
X4.4	Pearson Correlation	,097	-,036	,120	1	,224*	,380**
	Sig. (2-tailed)	,382	,748	,276		,040	<,001
	N	84	84	84	84	84	84
X4.5	Pearson Correlation	,514**	,471**	,507**	,224*	1	,804**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	,040		<,001
	N	84	84	84	84	84	84
TOTAL	Pearson Correlation	,799**	,719**	,714**	,380**	,804**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	84	84	84	84	84	84

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	,126	,226*	,266*	,170	,262*	,172	,194	,234*	,495**
	Sig. (2-tailed)		,252	,039	,014	,122	,016	,119	,077	,032	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Y.2	Pearson Correlation	,126	1	,131	,126	,525**	,134	,100	,621**	,479**	,624**
	Sig. (2-tailed)	,252		,235	,254	<,001	,225	,368	<,001	<,001	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Y.3	Pearson Correlation	,226*	,131	1	,704**	,243*	,238*	,112	,139	,134	,580**
	Sig. (2-tailed)	,039	,235		<,001	,026	,029	,309	,206	,223	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Y.4	Pearson Correlation	,266*	,126	,704**	1	,382**	,159	,228*	,273*	,171	,654**
	Sig. (2-tailed)	,014	,254	<,001		<,001	,150	,037	,012	,119	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Y.5	Pearson Correlation	,170	,525**	,243*	,382**	1	,283**	,036	,569**	,285**	,656**
	Sig. (2-tailed)	,122	<,001	,026	<,001		,009	,747	<,001	,009	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84

Y.6	Pearson Correlation	,262*	,134	,238*	,159	,283**	1	,273*	,257*	-,039	,428**
	Sig. (2-tailed)	,016	,225	,029	,150	,009		,012	,018	,725	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Y.7	Pearson Correlation	,172	,100	,112	,228*	,036	,273*	1	,298**	,249*	,446**
	Sig. (2-tailed)	,119	,368	,309	,037	,747	,012		,006	,022	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Y.8	Pearson Correlation	,194	,621**	,139	,273*	,569**	,257*	,298**	1	,367**	,715**
	Sig. (2-tailed)	,077	<,001	,206	,012	<,001	,018	,006		<,001	<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Y.9	Pearson Correlation	,234*	,479**	,134	,171	,285**	-,039	,249*	,367**	1	,600**
	Sig. (2-tailed)	,032	<,001	,223	,119	,009	,725	,022	<,001		<,001
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
TOTAL	Pearson Correlation	,495**	,624**	,580**	,654**	,656**	,428**	,446**	,715**	,600**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HASIL UJI RELIABILITAS

A. Pemahaman Peraturan Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	84	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	84	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,687	6

B. Tarif Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	84	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	84	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,769	7

C. Sanksi Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	84	100,0

	Excluded[a]	0	,0
	Total	84	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,827	5

D. Kesadaran Wajib Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	84	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	84	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,722	5

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	84	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	84	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

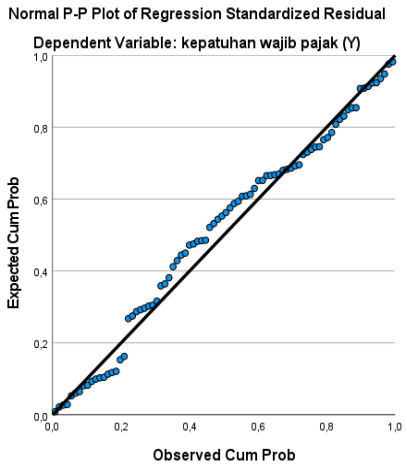
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,751	9

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

A. Uji Normalitas

Probability Plot



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,27409403
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,075
	Negative	-,079
Test Statistic		,079

Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			,200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		,225
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,214
		Upper Bound	,235

a. Test Distribution is Normal.
b. Calculated From Data.
c. Liliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

B. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,772	5,232		,912	,365
	Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	,006	,113	,006	,055	,956
	Tarif Pajak (X2)	,003	,099	,003	,027	,978
	Sanksi Pajak (X3)	-,072	,079	-,107	-,923	,359
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	-,047	,122	-,047	-,387	,700

a. Dependent Variable: Abs_Res

C. Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	20,419	8,851		2,307	,024		
	Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	,088	,191	,051	,461	,646	,956	1,046
	Tarif Pajak (X2)	,107	,167	,073	,639	,525	,899	1,112
	Sanksi Pajak (X3)	,031	,133	,027	,236	,814	,929	1,076
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	,446	,207	,254	2,158	,034	,853	1,172

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

HASIL UJI HIPOTESIS

A. Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20,419	8,851		2,307	,024
	Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	,088	,191	,051	,461	,646
	Tarif Pajak (X2)	,107	,167	,073	,639	,525
	Sanksi Pajak (X3)	,031	,133	,027	,236	,814

	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	,446	,207	,254	2,158	,034

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

B. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,261[a]	,068	,021	3,35596

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Pemahaman Peraturan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X3), Tarif Pajak (X2)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

2. Nama : Siti Lu'lu'uz Zakiyah
3. Tempat & Tanggal Lahir : Grobogan, 18 November 2000
4. Alamat Rumah : Ketangi Rt 04/ Rw 05, Ketangirejo, Godong, Grobogan
5. No HP : 0895340411700
6. Email : *luluzakiya22@gmail.com*
7. Nama Ayah : Nur Asikin
8. Pekerjaan : Petani
9. Nama Ibu : Muntasiroh
10. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Ketangirejo, Godong, Grobogan.
2. MTS Matholiul Anwar Sarimulyo, Kebon Agung, Demak.
3. MA Al-Azhar Kacangan, Andong, Boyolali.